

**PARTISIPASI SEMU DAN FENOMENA GOLPUT PADA
PEMILIHAN WALIKOTA BANDA ACEH 2017**

S K R I P S I



Diajukan Oleh :

**ARIEF RACHMAN MISSUARI
NIM. 150801061
Program Studi Ilmu Politik**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM - BANDA ACEH
2019 M/1440 H**

SKRIPSI

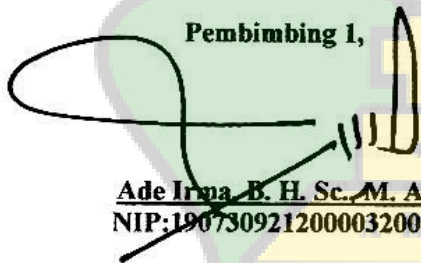
**Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Beban Studi untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Politik**

Diajukan Oleh:

**ARIEF RACHMAN MISSUARI
NIM. 150801061
Program Studi Ilmu Politik**

Disetujui Untuk Diuji / Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,


Ade Irma B. H. Sc., M. A.
NIP:1907309212000032004

Pembimbing II,


Rizkika Lhena Darwin, MA
NIP:198812072072018032001

SKRIPSI

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Dan dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1) Ilmu Politik

Diajukan Oleh:

ARIEF RACHMAN MISSUARI
NIM. 150801061

Pada Hari/Tanggal
Senin 2 Desember 2019 M/1441 H

Di Darussalam - Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua


Ade Irma, B.H. Sc., M.A
NIP:198812072018032001

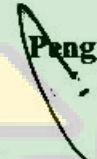
Sekretaris


Rizkika Lhena Darwin, MA
NIP:198812072018032001

Penguji 1


DR. Muslim Zainuddin, M. Si
NIP:19661023199421001

Penguji 2


Aklima, S. Fil. L, MA
NID:2006108802

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry
Darussalam - Banda Aceh




Ernita Dewi, S.Ag., M.Hum
NID:199307232000032002

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Arief Rachman Missuari
NIM : 150801061
Program studi : Ilmu Politik
Universitas : UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini benar dibuat oleh penulis sendiri dan belum pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata didalam skripsi ini semua atau sebagian isinya terdapat unsur-unsur plagiat, maka saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang saya peroleh dapat dicabut/dibatalkan, serta dapat diperoleh sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh 20 November 2019
Yang Menyatakan,



Arief Rachman Missuari
NIM. 150801061

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “Partisipasi Semu dan Fenomena Golput Pada Pemilihan Walikota Banda Aceh 2017” pada pemilihan pilkada yang lalu Kota Banda Aceh masih saja terdaftar sebagai Kota yang tingkat partisipasinya rendah bertolak belakang dengan daerah yang lain, walaupun secara pendidikan warga kota baik tetapi mengapa banyak yang Golput. Dari 9 kecamatan Kuta Raja menjadi nomor satu daerah yang sangat Golput. Kuta Raja sendiri adalah daerah pesisir yang merupakan mayoritas berkerja sebagai nelayan. Dan juga merupakan daerah urban Kuta Raja sendiri juga merupakan daerah terparah terkena musibah Tsunami silam di Aceh yang sekarang sudah mulai berkembang kembali dengan banyaknya pendatang baru yang hal tersebut membawa permasalahan baru “Golput”. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu peneliti memberikan gambaran secara jelas dan sistematis terkait dengan objek yang akan diteliti agar memberi informasi dan data yang benar terkait fakta-fakta dilapangan. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukan adanya rasa kecewa hampir di setiap lapisan masyarakat terhadap pemerintahan yang bersumber luka pasca Pilkada yang berupa janji yang tidak ditepati, menariknya dalam penelitian ini juga melahirkan suatu paham baru yang dimana sebelumnya tidak ada yang dimana adanya Partisipasi Semu yang lahir dari kekecewaan masyarakat terhadap pemerintah.

Kata kunci: Pilkada Banda Aceh 2019, Golput, Budaya partisipasi semu, budaya politik Parokial



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah Swt berkat rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Partisipasi Semu dan Fenomena Golput pada Pemilihan Walikota Banda Aceh 2017”. Shalawat beserta salam penulis sampaikan kepada Baginda Rasulullah Muhammad Saw yang telah berhasil membawa umat manusia dari lembah kebodohan atau kejahilan kepada alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Skripsi ini dibuat sebagai salah satu beban studi atau sebagai salah satu syarat kelulusan pendidikan pada jurusan Ilmu politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan (FISIP) Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Oleh sebab itu, semoga penulisan skripsi dapat bermanfaat kepada semua pihak khususnya pihak terkait yang membutuhkan data hasil penelitian ini.

Penulis mengakui bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dan perlu adanya kritik, masukan dan saran dari semua pihak untuk perbaikan dikemudian hari. Terimakasih kepada semuanya, semoga Allah Swt senantiasa memberikan hidayah-Nya kepada kita semua. Amin.

Dalam proses penulisan skripsi ini, harus disadari bahwa tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan, arahan dan motivasi serta partisipasi dari berbagai pihak yang terlibat untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu melalui tulisan ini, penulis ingin menyampaikan terimakasih kepada:

1. Kedua orang tua (Alm) Ayahanda Mansur M.Kiran dan Ibunda Mardiana Hasan, sungguh ananda tidak akan dapat membalas semua jasa selama ini. Lantunan doa semoga sedikit banyak bisa menjadi tanda bakti hamba kepada keduanya. Terimakasih juga untuk adik tercinta Fajar Dina Aulia yang selalu bertanya kapan wisuda sehingga penulis menjadi termotivasi untuk mengerjakan skripsi dengan segera.
2. Bapak Prof. Dr.H. Warul Walidin, AK., MA. Selaku Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
3. Ibu Dr. Ernita Dewi, S.Ag., M.Hum selaku Dekan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
4. Ibu Rizkika Lhena Darwin, Ma selaku Ketua Program Studi Ilmu Politik UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
5. Terimakasih kepada Ibu Ade Irma B. H. Sc., M. A. Dan Ibu Rizkika Lhena Darwin, Ma Selaku dosen pembimbing yang telah banyak membantu penulis dalam merampungkan tugas akhir ini. Harus penulis akui banyak sekali ilmu yang penulis dapatkan selama bimbingan dengan Ibu Ade Irma B. H. Sc., M. A. Dan Ibu Rizkika Lhena Darwin, Ma
6. Terimakasih kepada Bapak Dr. Muslim Zainuddin, M. Si selaku dosen penguji I dan Ibu Aklima, S.Fil.I, MA yang telah mencurahkan pikiran, waktu dan tenaganya untuk penyelesaian skripsi ini.
7. Terimakasih kepada seluruh dosen FISIP lain yang namanya tidak dapat disebutkan satu persatu, terimakasih atas ilmu yang diberikan selama ini.

8. Terimah kasih kepada teman-teman seperjuangan untuk meraih gelar S,IP, kawan- kawan totok jaburais,Fisuar Films Yogi Afriansyah,M dios, Reza Arisma. Z dan pastinya seluruh angkatan 2015 yang telah menyemangati penulis selama ini. Semoga kita bisa segera selesai sama-sama.
9. Terkhusus untuk informan yang telah banyak membantu penulis dalam memberikan informasi yang penulis butuhkan. Dan sepesial kepada Persatuan Nelayan di Lampulo sudah memberikan tak hanya wawancara tetapi juga izin untuk bisa melakukan proses shutting film ngon laot Terimakasih atas keramahan dan ketulusannya.

Hanya dengan iringan do'alah penulis berharap semoga kebaikan yang telah diberikan menjadi amal shaleh dan diterima oleh Allah SWT. *Aamiin Yaa Rabbal 'Alamin*. Dari lubuk hati terdalam penulis mengakui pasti masih banyak sekali kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Kritik dan saran yang membangun untuk perbaikan ke depan sangat penulis harapkan dari pembaca semuanya.

Banda Aceh, 20 November 2019
Penulis,

Arief Rachman Missuari

DAFTAR ISI

LEMBARAN PENGESAHAN.....	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	ii
ABSTRAK	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR LAMPIRAN	vi
DAFTAR TABEL.....	vii
 BAB I PENDAHULUAN.....	 1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	4
1.3. Tujuan Penelitian	4
1.4. Manfaat Penelitian	4
 BAB II KAJIAN PUSTAKA	 6
2.1. Penelitian Terdahulu	6
2.2. Landasan Teori.....	8
2.2.1 Konsep Golongan Putih	8
2.2.2 Teori Perilaku Memilih.....	16
2.2.3 Teori Partisipasi Pemilih.....	18
2.2.4 Pengertian Partisipasi Semu dan Budaya Politik	26
 BAB III METODE PENELITIAN	 37
3.1. Metode Penelitian.....	37
3.2. Lokasi Penelitian.....	37
3.3. Pendekatan Penelitian.....	38
3.4. Informan Penelitian.....	39
3.5. Sumber Data.....	39
3.6. Teknik Pengumpulan Data	40
3.7. Analisis Data	42
 BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	 44
4.1. Gambaran Umum Kecamatan Kuta Raja Kota Banda Aceh	44
4.2. Political Distrust dan Golput di Kota Banda Aceh	50
4.3. Partisipasi Semu dan Budaya Politik Memilih Pada Pilkada Wali Kota.....	56

BAB V PENUTUP	61
A. KESIMPULAN	61
B. SARAN	62
DAFTAR PUSTAKA	63
LAMPIRAN	



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Surat Izin Penelitian Dari Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan (Fisip)
Lampiran 2 : Surat Balasan Penelitian
Lampiran 3 : Surat Rekomendasi Penelitian Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh.
Lampiran 3 : SK Bimbingan
Lampiran 4 : Profil Informan
Lampiran 5 : Dokumentasi Penelitian



DAFTAR TABEL

Tabel 1	Kondisi Ekonomi, Pengangguran dan Kemiskinan.....	45
Tabel 2	Pekerjaan Masyarakat Kecamatan Kuta Raja	46
Tabel 3	Gambaran Partisipasi pada Pilkada Walikota Banda Aceh 2017.....	47
Tabel 4	Gambaran Sub Wilayah Golput Pada Pilkada Walikota Banda Aceh 2017	48



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia sudah melaksanakan pemilihan umum sejak bangsa Indonesia mendelegasikan kemerdekaannya, akan tetapi proses demokratisasi lewat sejumlah pemilu terdahulu belum mampu melahirkan nilai-nilai demokratisasi yang matang akibat sistem politik yang masih otoriter. Setelah reformasi dan terlepas dari sistem otoritarian, penyelenggaraan pemilu 2004 yang terdiri pemilihan umum presiden dan pemilihan umum legislatif yang berjalan tanpa ada tindakan kekerasan dan kerusuhan yang menjadi awal baik prestasi bersejarah bagi bangsa ini.

Namun demikian, momentum Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang berlangsung sejak tahun 2005 ternyata menyimpan permasalahan pada tahapan demokratisasi di Indonesia. Hal tersebut merupakan konsekuensi perubahan tatanan kenegaraan kita sebagai dampak dari amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Amandemen ini pada hakikatnya mengelola penyelenggaraan pemerintah daerah dalam rangka melaksanakan kebijakan desentralisasi.¹

Pelaksanaan Pilkada yang pertama sekali di Indonesia diadakan di Kabupaten Kutai Kartanegara pada 1 juni 2015, di kecamatan tersebut tingkat Golongan Putih (Golput) dalam pelaksanaan Pilkada terbilang tinggi mencapai 45% pada Pilkada Gubernur Kalimantan Timur tahun 2013 sejak awal bergulirnya pemilihan langsung tahun 2005. Tingginya angka golput dilatarbelakangi oleh

¹ Abdullah, Rozali. 2005. Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung. Jakarta: PT. Raja Grafindo. Hlm.13

beberapa hal diantaranya persoalan administratif, pemilih malas datang ke tempat Perhitungan Suara (TPS) dikarenakan apatis dengan konstentasi Pilkada yang berlangsung.² Pada setiap Pilkada yang berjalan di Indonesia menyimpan banyak persoalan terutama rendahnya partisipasi masyarakat dalam menyukseskan penyelenggaraan Pilkada yang diindikasikan oleh tingginya angka golput itu sendiri. Termasuk pada penyelenggaraan Pilkada yang diselenggarakan di Aceh.

Fenomena golput pada pilkada yang sebelumnya yang diselenggarakan di Provinsi Aceh tahun 2012 lebih dari 24%, dari daftar pemilih tetap berjumlah 3.244.729 orang sebanyak 787.533 orang yang tidak memberikan suaranya. Sedangkan pada 2017 persentase Golput lebih dari 37% dari daftar pemilih yang terdaftar mencapai 3.434.722 orang, dengan demikian jumlah orang yang tidak menggunakan hak pilihnya sebanyak 910.309 orang,³. Begitu pula dengan angka Golput di Kota Banda Aceh yang masih cukup tinggi.

Dari 23 Kabupaten Kota yang melaksanakan Pilkada pada 2012 Kota Banda Aceh menduduki posisi tertinggi angka Golput masyarakat yang berpartisipasi hanya 63% dari jumlah pemilih tetap Kota Banda Aceh sebanyak 158.759 jiwa selebihnya 69.338 tidak menggunakan hak pilihnya, sedangkan Pilkada 2017 meningkat 1 angka 64% dari jumlah pemilih tetap Kota Banda Aceh sebanyak 149.224 jiwa selebihnya 55.655 tidak menggunakan hak pilihnya.⁴

² Rinjani,Rahman. 2014.Studi Tentang Golongan Putih Dalam Pilkada Gubernur Kaltim 2013 di Kecamatan Muara. INKLUSI, Hlm. 6 –13.

³ <https://kip.acehprov.go.id/>

⁴ kpukotaBandaAceh.com

Mayoritas penyebab Golput tersebut secara keseluruhan diindikasikan karena kekecewaan masyarakat Kota Banda Aceh terhadap kondisi politik Kota Banda Aceh serta faktor kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan yang kebijakannya tidak dirasakan langsung oleh masyarakat. Masyarakat cenderung untuk tidak menggunakan hak pilihnya pada Pilkada tahun 2012 dan tahun 2017.⁵

Berdasarkan observasi awal penulis menemukan hal yang berbeda pada Pilkada Kota Banda Aceh tahun 2017. Dimana partisipasi masyarakat dalam pilkada dapat membaca partisipasi publik secara keseluruhan yang menggambarkan keterputusan elektoral. Mereka terlibat dalam masa kampanye untuk mengambil pemberian dari kandidat, Namun tetap memutuskan tidak memilih ketika hari pemilihan. Partisipasi material menguatkan argumentasi budaya politik tradisional yang masih sangat kuat pasca reformasi.⁶

Menarik bila melihat fenomena di atas pada pilkada Kota Banda Aceh. Selain tingkat partisipasi yang rendah, Banda Aceh merupakan daerah dengan konteks masyarakat perkotaan yang sangat kompleks. Terutama Kecamatan Kuta Raja menduduki peringkat pertama yang partisipasinya sangat kurang dengan delapan kecamatan lainnya yang ada di Banda Aceh yaitu sebanyak 48.7% jika dihitung total pemilih yang tidak berpartisipasi sebanyak 4.274 dari total 8.960 pemilih di kecamatan tersebut. Kecamatan ini memiliki beragam latar belakang penduduk diantaranya nelayan dengan daerah laut serta pedagang dengan daerah perdagangan, serta mayoritas pedagang karena merupakan daerah urban.

⁵ Iqbal, Muhammad. 2018. *Perbandingan Fenomena Golongan Putih pada Pemilihan dan wakil gubernur Aceh*. Hal : 11-12

⁶ Kacung. 2006 *Marijan Demokrasi di daerah : Pelajaran dari pilkada secara langsung*. Pustaka Eureka Hal : 56

Melihat latar belakang di atas peneliti tertarik untuk mengetahui dan memfokuskan model partisipasi semu dan Golput maka dengan itu penulis mengangkat judul penelitian **“Partisipasi Semu dan Fenomena Golput pada Pemilihan Walikota Banda Aceh 2017”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas adapun rumusan masalahnya adalah :

1. Mengapa tingkat Golput masyarakat Kecamatan Kuta Raja pada Pilkada tinggi ?
2. Bagaimana pengaruh model partisipasi semu terhadap budaya memilih masyarakat Kecamatan Kuta Raja pada Pilkada 2017 ?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun penelitian ini bertujuan adalah:

1. Untuk menjelaskan mengapa tingkat Golput masyarakat Banda Aceh pada Pilkada tinggi.
2. Untuk menjelaskan pengaruh model partisipasi semu terhadap budaya politik memilih masyarakat Kota Banda Aceh.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah:

1. Memberikan sumbangan dan kontribusi pemikiran terhadap perkembangan ilmu politik wawasan dan pengetahuan.
2. Secara akademis dapat memperkaya khazanah keilmuan dan menambah referensi bagi mahasiswa. Khususnya mahasiswa ilmu politik FISIP UIN

Ar-Raniry mengenai penelitian terkait fenomena Golput di Kecamatan Kuta Raja pada Pilkada Walikota Banda Aceh 2017.

3. Dengan hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi penulis lainnya yang ingin mengembangkan lebih lanjut penelitian ini.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Untuk mendukung penelitian ini akan dicantumkan beberapa hasil penelitian terdahulu diantaranya :

Yoza Habibie mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Syiah Kuala dalam penelitiannya yang berjudul “Fenomena Timbulnya Golongan Putih (golput) pada Pemilukada Walikota/Wakil Walikota 2012 di Kota Langsa (2014)”⁷. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti apa saja faktor-faktor penyebab munculnya golongan putih pada pemilu kepala daerah Walikota dan Wakil Walikota 2012 di Kota Langsa.

Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa adanya golongan putih di Kota Langsa pada Pemilukada 2012 tergolong cukup memperhatikan, ajang yang seharusnya menentukan pemimpin yang akan mengubah nasib daerah dipandang masih kurang dipedulikan oleh warga Kota Langsa, faktor yang melatarbelakangi timbulnya golongan putih dikarenakan oleh faktor sosial ekonomi, psikologis dan rasional.

Persamaan penelitian Yoza Habibi dengan penelitian saya yaitu meneliti tentang fenomena golput, perbedaan penelitian Yoza Habibi dengan penelitian saya adalah ruang lingkup penelitian dan lokasi penelitian perbedaan dan persamaan tersebut semakin menerangkan bahwa terdapat banyak penyebab yang melatarbelakangi terjadinya golput pada setiap pemilihan umum.

⁷ Yoza Habibie. 2014 *Fenomena Timbulnya Golongan Putih (Golput) pada Pemilukada Walikota/Wakil Walikota 2012 di Kota Langsa*. Skripsi Fisip Unsyiah.

Selanjutnya Nuzul Apriliani mahasiswi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Syiah Kuala dalam penelitiannya yang berjudul “Faktor-Faktor Yang mempengaruhi Terjadinya Golput Pada Pemilu Tahun 2012 Di Kota Banda Aceh”.⁸ Penelitiannya bertujuan untuk mengetahui alasan masyarakat Banda Aceh memilih menjadi golput pada pemilu tahun 2012 di Kota Banda Aceh serta mengetahui persepsi masyarakat Kota Banda Aceh terhadap fenomena golput pada pemilu tahun 2012.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa alasan masyarakat memilih golput pada pemilu tahun 2012 didasari dengan berbagai faktor, yaitu kurangnya kesadaran politik masyarakat, menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat, kurangnya legitimasi terhadap pemerintah, masyarakat lebih memilih liburan dari pada ke TPS, figur partai politik dan kurangnya kinerja KIP. Selanjutnya persepsi masyarakat terhadap fenomena golput, bagi mereka fenomena golput telah menjadi hal yang lumrah terjadi pada saat dilaksanakan pemilu dan masyarakat Banda Aceh telah memiliki pemahaman tentang golput itu sendiri.

Penelitian Nuzul Apriliani memiliki fokus yang sama dengan kajian ini yaitu sama-sama menjelaskan tentang faktor yang menjadi alasan masyarakat memutuskan golput. Selanjutnya perbedaan skripsi Nuzul dengan kajian ini terletak pada fokus penelitian nya dan waktunya, penelitian ini lebih fokus kepada upaya menjelaskan isu agama dan fenomena golput di Kota Banda Aceh pada kecamatan Kuta Raja pada Pilkada 2017 di Kota Banda Aceh.

⁸ Nuzul Apriliani. 2013. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Golput Pada Pemilu Tahun 2012 Di Kota Banda Aceh*. Skripsi. Fisip Unsyiah

Selanjutnya Nurfitri mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry dalam penelitiannya yang berjudul “Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pilkada Kota Banda Aceh 2017 (Analisis Terhadap Menurunnya Angka Golongan Putih)”.⁹ Penelitian ini bertujuan untuk melihat apa saja faktor-faktor yang berpengaruh atas penurunan angka Golput pada Pilkada Kota Banda Aceh 2017.

Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pengaruh tingkat pengangguran terhadap angka golongan putih ini cukup berpengaruh dengan masyarakat yang pengangguran. Hal ini dikarenakan kekecewaan yang dialami oleh masyarakat terhadap kandidat karena tidak menepati janjinya yang menyediakan lapangan pekerjaan sehingga hal ini berdampak kepada masyarakat lebih memilih golput.

Penelitian Nurfitri memiliki permasalahan yang sama dengan kajian ini tentang faktor yang menjadi alasan masyarakat memutuskan golput. Selanjutnya perbedaan skripsi Nurfitri dengan kajian ini terletak pada fokus penelitian dan waktunya penelitiannya.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Konsep Golongan Putih

Istilah golongan putih mulai muncul pada masa berakhirnya orde lama menuju orde baru tahun 1971, golput biasa digunakan untuk mengidentifikasi kelompok masyarakat yang dengan sadar tidak memberikan hak memilihnya pada pemilihan sebagai bentuk protes terhadap pemerintahan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) golput merupakan akronim dari golongan putih.

⁹ Nurfitri. 2019. *Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pilkada Kota Banda Aceh 2017 (Analisis Terhadap Menurunnya Angka Golongan Putih)*. Skripsi. Fisip Uin Ar-raniry.

Golongan putih merupakan istilah politik yang berarti warga negara yang menolak memberikan suaranya pada pemilihan umum sebagai tanda protes.¹⁰

Golput dapat disebut juga dengan “*NO voting Desio*” yang selalu ada di setiap pemilihan umum pada pesta demokrasi di dunia terutama yang menggunakan sistem pemilihan langsung (*direct voting*). Golput adalah orang-orang yang komitmen untuk tidak memilih di saat pemilu telah tiba atau mereka tetap meghadiri TPS namun tidak mengikuti prosedur-prosedur yang ditetapkan oleh pihak penyelenggara dalam kaitannya dengan tatacara memilih.

Golput adalah sekelompok orang yang tidak memberikan suara pada pemilu, pemilu merupakan bentuk kebutuhan dan kepentingan mereka, yang mana dengan pemilu akan tersalur atau sekurang-kurangnya diperhatikan dan mereka sedikit banyak daat mempengaruhi tindakan-tindakan dari pemimpin yang berwenang untuk membuat keputusan-keputusan yang mengikat.¹¹

Golput dapat di klasifikasi dalam beberapa katagori, *Pertama*, Golput kritis, yakni golput yang menentukan karena pilihan pribadi, memahami konsekuensi dari pilihanya berdasarkan pengamatan yang matang memahami dampak dari keputusannya serta memalukan *chek and balances* setelah selesai pemilu. Di sini diartikan sebagai golput yang tetap akan memberikan kritik, masukan tidak membiarkan pemenang pemilu nantinya berjalan tanpa arah. *Kedua*, golput ikutan, golput yang hanya ikut-ikutan karena anjuran, dorongan, atau melihat tokoh tertentu yang memilih golput. *Ketiga*, golput akibat partanya

¹⁰ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Penerbit Balai Pustaka, 2007), hlm. 368.

¹¹ Miriam Budiarmo, *Demokrasi Di Indonesia Antara Demokrasi Parlemen Dan Demokrasi Pancasila* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1994), hlm. 185.

tidak lolos dalam verifikasi KPU (Komisi Pemilihan Umum) baik pusat maupun daerah sehingga partainya tidak bisa menjadi salah satu kontestan pemilu. *Keempat*, golput sakit hati, yakni golput yang didasarkan akibat kontestan tidak diloloskan oleh partainya sebagai calon misalnya. *Kelima*, golput apatis mereka yang beranggapan bahwa memilih ataupun tidak, merasa tidak ada bedanya baik bagi dirinya maupun golongannya.¹²

Secara umum terdapat dua pendekatan untuk menjelaskan kehadiran pemilih atau tidak hadir dalam suatu pemilu, pendekatan pertama menekankan pada karakteristik sosial dan psikologi pemilih dan karakteristik istitusional sistem pemilu sementara itu pendekatan kedua menekankan harapan pemilih tentang kekurangan dan kerugian atas keputusan mereka untuk hadir atau tidak hadir memilih.¹³

Dapat disimpulkan, pilihan untuk golput secara konstitusional memang tidak memiliki konsekuensi hukum, melainkan sekedar konsekuensi moral di dalam komunikasi masyarakat tertentu. Golput pada dasarnya juga merupakan identitas politik untuk menyuarakan aspirasi rakyat bila dilakukan atas dasar kesadaran politik yang tinggi.

Selanjutnya, menurut Rosenberg ada 3 alasan mengapa orang enggan sekali berpartisipasi politik dan menjadi golput :¹⁴

¹² KH. Abdurrahman Wahid, Halim HD, dkk. *Mengapa Kami Memilih Golput* (Jakarta: Sagon, 2009), hlm 34

¹³ David Moon The Determinants of Turnout in President Election An Integrative Model Accounting for Information dalam *Political Behaviour* Vol 14 No 2 1992 hlm 123-140

¹⁴ Michael rush dan althoff, *Pengantar Sosiologi Politik*, Jakarta PT Rajawali.1989 hal :131

1. Individu memandang aktivitas politik merupakan ancaman terhadap beberapa aspek kehidupannya. Ia beranggapan bahwa mengikuti kegiatan politik dapat merusak hubungan social dengan lawannya dan dengan pekerjaannya karena kedekatannya dengan partai- partai politik tertentu.
2. Konsekuensi yang ditanggung dari suatu aktifitas politik mereka sebagai pekerjaan sia- sia. Mungkin di sini individu merasa adanya jurang pemisah antara cita-citanya dengan realitas politik. Karena jurang pemisah begitu besarnya sehingga dianggap tiada lagi aktifitas politik yang kiranya dapat menjembatani.
3. Beranggapan memacu diri untuk tidak terlibat atau sebagai perangsang politik adalah sebagai faktor yang cukup penting untuk mendorong aktifitas politik. Dengan tidak adanya perangsang politik yang sedemikian, hal itu membuat atau mendorong kearah perasaan yang semakin besar bagi dorongan apatis. Di sini individu merasa kegiatan bidang politik diterima sebagai yang bersifat pribadi sekali dari pada sifat politiknya. dan dalam hubungan ini, individu merasa bahwa kegiatan-kegiatan politik tidak dirasakan secara langsung menyajikan kepuasan yang relatif kecil. Dengan demikian partisipasi politik diterima sebagai suatu hal yang sama sekali tidak dapat dianggap memenuhi kebutuhan pribadi dan kebutuhan material individu itu.

Sedangkan menurut Novel Ali, di Indonesia terdapat dua kelompok golput :

- a. Kelompok Golput Awam

Yang dimaksud dengan golput awam yaitu mereka yang tidak mempergunakan hak pilihnya bukan karena alasan politik, tetapi karena alasan ekonomi, kesibukan dan sebagainya. Kemampuan politik kelompok ini tidak sampai ke tingkat analisis, melainkan hanya sampai tingkat deskriptif saja.

b. Kelompok Golput Pilihan

Yang dimaksud dengan golput pilihan yaitu mereka yang tidak bersedia menggunakan hak pilihnya dalam pemilu benar-benar karena alasan politik. Misalnya tidak puas dengan kualitas partai politik yang ada atau karena mereka menginginkan adanya satu organisasi politik lain yang sekarang belum ada. Maupun karena mereka mengkehendaki pemilu atas dasar system distrik, dan berbagai alasan lainnya. Kemampuan analisis politik mereka jauh lebih tinggi dibanding golput awam. Golput pilihan ini memiliki kemampuan analisis politik yang tidak hanya berada pada tingkat deskripsi saja, tapi juga pada tingkat evaluasi.¹⁵

Penyebab dilatarbelakangi oleh berbagai alasan, diantaranya.¹⁶ Pertama, masyarakat jenuh terhadap penyelenggaraan pesta demokrasi. Kejenuhan tersebut datang karena masyarakat dalam dua tahun terakhir menghadapi empat kali pelaksanaan pemilu yakni pemilihan gubernur, pemilihan legislatif, pemilihan

¹⁵ Novel Ali, *Peradaban Komunikasi Politik*, Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 1999, hal. 22

¹⁶ Marwiyah.Siti (2016). *Golput dalam pemilukada serentak*. Jakarta : Jurnal etika & pemilu hal 80

presiden dan terakhir pemilihan bupati/wali kota maka dari itu masyarakat sudah jenuh untuk menggunakan hak pilihnya.¹⁷

Kedua, sikap apatis masyarakat terhadap pelaksanaan pemilukada terutama kelompok masyarakat yang selama ini kurang merasakan hasil pembangunan, sikap apatis masyarakat itu ada karena pengalaman yang di rasakan selama ini bahwa siapapun yang terpilih pada pemilukada tidak akan membawa perubahan berarti pada kehidupan mereka, tidak jarang justru kebijakan yang akan dikeluarkan pemerintah terpilih yang merugikan masyarakat.

Ketiga, calon kepala daerah dalam pemilukada tidak sesuai dengan kriteria yang diinginkan oleh pemilih, jadi pemilih menggunakan berbagai pertimbangan yang ditunjukan pada sosok calon pemimpin daerah yang dinilainya tidak berintegritas dan berkapabilitas.¹⁸

Keempat, pembatasan sosialisasi kampanye sebagaimana yang di atur dalam peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) nomor 7 tahun 2015 telah menyebabkan sosialisasi tentang keberadaan pemilukada serta calon kepala daerah jauh melorot. Akibatnya bisa di tebak pencapaian target partisipasi pemilih 77,5 persen sebagaimana yang dipatok oleh KPU sangat berat Arbi Sanit me nuturkan, partisipasi masyarakat pada Pemilukada serentak tahun 2015 harus menjadi bahan evaluasi penyelenggara pemilu, hampir semua segmen pemilih cenderung tidak mengetahui akan digelarnya pemilukada. Maka dari itu

¹⁷<http://kabar24.bisnis.com/read/20151212/15/501167/Pemilukada-serentak-tingginya-golput-bukti-masyarakat-alami-kejenuhan> di akses pada tanggal 13 agustus 2019

¹⁸ Abdul Jalil, Membedah Akar Golput dalam Pemilukada Serentak, Makalah, Surabaya, 21 Desember 2015, hlm.2

pemilukada kedepan harus benar-benar menjadi pesta rakyat maka publik harus terlibat dan hajatan pemilukada harus diinformasikan secara maksimal.¹⁹

Perilaku tidak memilih atau golput umumnya dipakai untuk merujuk pada fenomena ketidakhadiran seseorang dalam pemilu karena tidak adanya motivasi. Masyarakat pada beberapa negara berkembang saat ini mewujudkan perilaku golput tidak hanya dengan tidak hadir ke tempat pemungutan suara saja. Mereka melakukan hal sebaliknya, di mana mereka tetap datang ke tempat pemungutan suara dengan tidak mencoblos kartu suara atau merusak kartu suara. Bentuk perilaku golput ini dilakukan sebagai ekspresi protes terhadap pihak pemerintah, partai politik, dan lembaga-lembaga demokrasi lainnya. Perilaku golput di Indonesia pada umumnya dapat dimanifestasikan ke dalam beberapa bentuk, seperti yang dikemukakan Efriza berikut ini:²⁰

1. Orang yang menghadiri TPS sebagai aksi protes terhadap pelaksanaan pemilu dan sistem politik yang ada.
2. Orang yang menghadiri TPS namun tidak menggunakan hak pilihnya secara benar dengan menusuk lebih dari satu gambar.
3. Orang yang menggunakan hak pilihnya dengan jalan menusuk bagian putih dari kartu suara. Perilaku ini merupakan refleksi protes atas ketidakpuasan terhadap sistem politik yang sedang berkembang.
4. Orang yang tidak hadir di TPS dikarenakan mereka memang tidak terdaftar sehingga tidak memiliki hak suara. Perilaku golput ini

¹⁹ <http://www.suarakarya.id/2015/12/10/golput-juara-Pemilukada-serentak.html> diakses pada tanggal 12 Agustus 2019

²⁰ Efriza. 2012. *Political Explore*, Bandung : Alfabeta hal: 20

disebabkan alasan administratif dan kelompok golput ini disebut golput pasif.

Perilaku golput merupakan salah satu fenomena yang menjadi bagian dalam pemilihan umum sebagai perwujudan asas demokrasi kenegaraan. Memahami perilaku golput memang tidak sebatas pengamatan semata. Perilaku golput juga susah untuk dijelaskan karena alasan yang berbeda-beda dari pemikiran dan latar belakang setiap pemilih. Muhammad Asfar menjelaskannya dalam memahami perilaku bentuk golput diantaranya:²¹

1. Pendukung golput yang mengaku akan mengekspresikan perilakunya dengan cara tidak menghadiri bilik suara, setidaknya ada empat alasan sebagai argumentasi mereka tidak hadir di bilik suara, yaitu:
 - a. Sebagai aksi protes terhadap pemerintah, anggota DPR, dan parpol.
 - b. Tidak adanya nilai yang lebih dari proses pemilu yang terjadi.
 - c. Adanya urusan yang lebih penting seperti disinggung di atas mengenai tidak adanya nilai yang lebih dari proses pemilu.
 - d. Dikarenakan malas saja karena tidak adanya nilai lebih dari aktivitas politik melalui kehadiran di bilik suara.
2. Pendukung golput yang beralasan tetap hadir ke tempat pemungutan suara meskipun sudah menetapkan tidak memilih, ada beberapa alasan yang melatar belakanginya, yaitu:

²¹ Muhammad Asfar. 2004. *Presiden Golput*, Jakarta : Jawa Pos Press hal : 15

- a. Untuk menghindari sorotan pengurus kampung, khususnya ketua RT
 - b. Untuk menghindari perbincangan para tetangga.
 - c. Sebagai tindak pencegahan atas kecurangan yang mungkin bias dilakukan panitia pemilihan akibat ketidakhadirannya ke TPS.
3. Pendukung golput yang mengekspresikan perilakunya dengan mencoblos lebih dari satu kandidat atau tanda gambar, memasukkan kartu suara kosong atau mencoblos bagian putih dari kertas suara, pertimbangannya sebagai berikut :
 - a. Sebagai aksi protes baik kepada pemerintah, anggota DPR-DPRD, dan parpol.
 - b. Agar kertas suara tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.
 - c. Untuk memberikan dorongan dan keberanian pada publik agar berani menunjukkan sikap protes mereka melalui merusak kertas suara.
 - d. Agar parpol dan kandidat memperhitungkan keberadaan kelompok golput.²²

2.2.2 Teori Perilaku Memilih

Secara garis besar perilaku golput dapat dipahami dari tiga model yaitu pendekatan sosiologi, psikologi dan ekonomi sebagai berikut :

- a. Pendekatan Sosiologi

²²<http://digilib.unila.ac.id/10917/4/Bab%20II%20%28Skripsi%20Hendra%29.pdf>
diakses pada tanggal 3 Oktober 2019

Pendekatan ini menjelaskan karakteristik sosial dan pengelompokan sosial mempunyai pengaruh yang cukup signifikan dalam menentukan perilaku memilih seseorang. Pengelompokan seperti umur (tua-muda), jenis kelamin (laki-perempuan), agama dan sebagainya diyakini punya peranan penting mengkonstruksi pola pikir pemilih.

Pengaruh pengelompokan sosial dalam kaitannya dengan perilaku golput. Baginya perilaku golput dapat diletakkan dalam bingkai predisposisi sosial-ekonomi keluarga pemilih dan predisposisi sosial-ekonomi pemilih sendiri. Keduanya mempunyai hubungan signifikan dengan perilaku memilih seseorang. Maksudnya kondisi ayah dan ibu pemilih akan berpengaruh pada perilaku politik anak, termasuk dalam memilih agama yang dianut, tempat tinggal, dan kelas sosial. Artinya pendekatan sosiologi melihat perilaku golput seseorang sangat dipengaruhi oleh bagaimana pola hidup seseorang dan bagaimana dia menempatkan dirinya dalam kategori-kategori sosial di atas. Kelompok sosial itulah yang turut membentuk kesadaran ataupun kehendak perilaku politiknya.

b. Pendekatan Sosial Ekonomi

Faktor ini terbagi lagi ke dalam tiga indikator, yaitu tingkat pendidikan, tingkat pekerjaan, dan tingkat pendapatan. Raymond E. Wolfinger dan Steven J. Rosenstone menjelaskan bahwa sebagai berikut :²³

- a. Tingkat pendidikan tinggi menciptakan kemampuan lebih besar untuk mempelajari kehidupan politik tanpa rasa takut, sedangkan yang kurang berpendidikan berpengaruh untuk menghindari politik karena

²³ Raymond. Wolfinger 1997. *Partisipasi politik dan Partai Politik, Tingkah Laku*, Jakarta : Pustaka Pelajar hal : 20

kekurangan mereka terhadap kepentingan dalam proses politik. Penelitian Raymond E. Wolfinger dan Steven J. Rosenstone menunjukkan hubungan antara tingkat pendidikan dengan tingkat ketidakhadiran selalu menunjukkan arah berlawanan. Pemilih yang tingkat pendidikannya rendah cenderung menunjukkan angka ketidakhadiran dalam pemilu cukup tinggi.

- b. Tingkat pekerjaan tertentu lebih menghargai partisipasi warga. Para pemilih yang bekerja di lembaga berkaitan langsung dengan pemerintah cenderung lebih tinggi tingkat kehadirannya dalam pemilu dibandingkan para pemilih yang bekerja pada lembaga yang tidak mempunyai kaitan langsung dengan kebijakan pemerintah.
- c. Tingkat pendapatan tinggi memudahkan orang menanggung beban finansial akibat keterlibatannya dalam proses pemilu. Menurut Raymond E. Wolfinger dan Steven J. Rosenstone, para pemilih yang tingkat pendapatannya rendah cenderung menunjukkan angka ketidakhadiran cukup tinggi dan sebaliknya.²⁴

2.2.3 Teori Partisipasi Pemilih

Partisipasi politik merupakan suatu aktivitas tentu dipengaruhi oleh beberapa faktor. Menurut Ramlan Surbakti menyebutkan dua variable penting yang mempengaruhi tinggi rendahnya tingkat partisipasi politik seseorang. Pertama, aspek kesadaran politik terhadap pemerintah (sistem politik). Yang

²⁴Efriza, *political Explore*, 2012 di akses pada tanggal 11 November 2018 dari situs : <https://www.digilib.unila.ac.id/10917/4/Bab%20II%20%28Skripsi%20Hendra%29.pdf>.

dimaksud dalam kesadaran politik adalah kesadaran hak dan kewajiban warga negara. Misalnya hak politik, hak ekonomi, hak perlindungan hukum, kewajiban ekonomi, kewajiban sosial dll. Kedua, menyangkut bagaimana penilaian serta apresiasi masyarakat terhadap kebijakan pemerintah dan pelaksanaan pemerintahnya.²⁵

Partisipasi politik itu merupakan aspek penting dalam sebuah tatanan negara demokrasi sekaligus merupakan ciri khas adanya modernisasi politik. Di negara-negara yang proses modernisasinya secara umum telah berjalan dengan baik, biasanya tingkat partisipasi masyarakatnya meningkat. Modernisasi politik pada dasarnya merupakan kegiatan yang dilakukan warga negara yang terlibat dalam proses pengambilan keputusan dengan tujuan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan yang dilakukan pemerintah.²⁶

Partisipasi politik secara umum dapat didefinisikan sebagai kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut secara aktif dalam kehidupan politik, yaitu dengan jalan memilih pemimpin Negara dan langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan publik (public policy). Kegiatan ini mencakup tindakan seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum, menjadi anggota suatu partai atau kelompok kepentingan, mengadakan hubungan (contacting) dengan pejabat pemerintah atau anggota perlemen, dan sebagainya.²⁷

²⁵ Surbakti, Ramlan, 1992, Memahami Ilmu Politik, diakses pada tanggal 18 september dari situs <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jurnaleksektif/article/viewFile/16189/15693>

²⁶ Sudijono Sastroatmodjo, *Partisipasi Politik*, Semarang, :IKIP Semarang Press, 1995, hal :67

²⁷ Miriam Budiardjo, *Partisipasi Dan Partai politik*. Jakarta. Yayasan Obor Indonesia, 1998, hal :3

Dari pengertian mengenai partisipasi politik di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan partisipasi politik adalah keterlibatan individual atau kelompok sebagai warga negara dalam proses politik yang berupa kegiatan yang positif dan dapat juga bertujuan negatif yang bertujuan untuk berpartisipasi aktif dalam kehidupan berpolitik dalam rangka mempengaruhi kebijakan pemerintah.

Partisipasi politik merupakan suatu aktivitas tentu dipengaruhi oleh beberapa faktor. Menurut Ramlan Surbakti menyebutkan dua variable penting yang mempengaruhi tinggi rendahnya tingkat partisipasi politik seseorang. Pertama, aspek kesadaran politik terhadap pemerintah (sistem politik). Yang dimaksud dalam kesadaran politik adalah kesadaran hak dan kewajiban warga negara. Misalnya hak politik, hak ekonomi, hak perlindungan hukum, kewajiban ekonomi, kewajiban sosial dll. Kedua, menyangkut bagaimana penilaian serta apresiasi masyarakat terhadap kebijakan pemerintah dan pelaksanaan pemerintahannya.²⁸

Selain itu ada faktor yang berdiri sendiri artinya apabila rendah kedua faktor itu dipengaruhi oleh faktor-faktor lain, seperti status sosial, asumsi politik orang tua, dan pengalaman berorganisasi. Yang dimaksud status sosial yaitu kedudukan seseorang berdasarkan keturunan, pendidikan, pekerjaan, dan lain-lain. Selanjutnya status ekonomi yaitu kedudukan seseorang dalam lapisan masyarakat, berdasarkan pemilikan kekayaan. Seseorang yang mempunyai status sosial dan ekonomi tinggi diperkirakan tidak hanya mempunyai pengetahuan politik akan

²⁸ Surbakti, Ramlan, 1992, Memahami Ilmu Politik, diakses pada tanggal 11 Maret dari situs <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jurnaleksektif/article/viewFile/16189/15693>

tetapi memiliki minat serta perhatian pada politik dan kepercayaan terhadap Banyak pertimbangan dalam menggunakan hak pilihnya.

Bisa melihat dari sisi visi misi kandidat yang bagus meskipun tidak ada jaminan setelah kandidat terpilih. Selain itu berupa acuan yang digunakan untuk memilih adalah mereka kandidat yang memberikan uang, dan kandidat yang diusung oleh partai yang dianggap pemilih pemula sesuai dengan kriterianya. Pada perilaku pemilih yang rasional pemilih akan menentukan pilihannya berdasarkan isu politik dan kandidat yang diajukan serta kebijakan yang dinilai menguntungkan baginya yang akan ia peroleh apabila kandidat pilihannya terpilih. Pemilih yang rasional tidak hanya pasif dalam berpartisipasi tetapi aktif serta memiliki kehendak bebas.pemerintah.²⁹

Sementara itu menurut Milbrath memberikan alasan bervariasi mengenai partisipasi seseorang, yaitu:³⁰

- a. berkenaan dengan penerimaan perangsang politik. Milbrath menyatakan bahwa keterbukaan dan kepekaan seseorang terhadap perangsang politik melalui kontak-kontak pribadi, organisasi dan melalui media massa akan memberikan pengaruh bagi keikutsertaan seseorang dalam kegiatan politik.
- b. berkenaan dengan karakteristik sosial seseorang. Dapat disebutkan bahwa status ekonomi, karakter suku, usia jenis kelamin dan keyakinan (agama). Karakter seseorang berdasarkan faktor-faktor tersebut memiliki pengaruh yang relatif cukup besar terhadap partisipasi politik.

²⁹ Ramlan Surbakti. 1992.*Memahami Ilmu Politik*. hal : 140

³⁰ Milbrath, 2015. *Partisipasi masyarakat dalam negara demokrasi*. Pertada Media hal :

- c. menyangkut sifat dan sistem partai tempat individu itu hidup. Seseorang yang hidup dalam negara yang demokratis, partai - partai politiknya cenderung mencari dukungan massa dan memperjuangkan kepentingan massa, sehingga massa cenderung berpartisipasi dalam politik.
- d. adanya perbedaan regional. Perbedaan ini merupakan aspek lingkungan yang berpengaruh terhadap perbedaan watak dan tingkah laku individu. Dengan perbedaan regional itu pula yang mendorong perbedaan perilaku politik dan partisipasi politik.

Partisipasi pemilih pemula dalam pilkada langsung memang erat kaitanya dengan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Banyak pertimbangan dalam menggunakan hak pilihnya. Bisa melihat dari sisi visi misi kandidat yang bagus meskipun tidak ada jaminan setelah kandidat terpilih. Selain itu berupa acuan yang digunakan untuk memilih adalah mereka kandidat yang memberikan uang, dan kandidat yang diusung oleh partai yang dianggap pemilih pemula sesuai dengan kriterianya.

A. Rahman H.I menyatakan bahwa secara umum tipologi partisipasi sebagai kegiatan dibedakan menjadi:³¹

- a. Partisipasi aktif, yaitu partisipasi yang berorientasi pada proses input dan output.
- b. Partisipasi pasif, yaitu partisipasi yang berorientasi hanya pada output, dalam arti hanya menaati peraturan pemerintah, menerima dan melaksanakan saja setiap keputusan pemerintah.

³¹ Rahman. 1999. *Peradaban Komunikasi Politik*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya hal : 34

- c. Golongan putih (golput) atau kelompok apatis, karena menggap sistem politik yang ada menyimpang dari yang dicita-citakan.

Sedangkan A. Rahman H.I memandang partisipasi sebagai dimensi utama startifikasi sosial. Ia membagi partisipasi menjadi enam lapisan, yaitu pemimpin politik, aktivitas politik, komunikator (orang yang menerima dan menyampaikan ide-ide, sikap dan informasi lainnya kepada orang lain), warga masyarakat, kelompok marginal (orang yang cukup sedikit melakukan kontak dengan sistem politik) dan kelompok yang terisolasi (orang yang jarang melakukan partisipasi politik).

Menurut Paige pada tinggi rendahnya kesadaran politik dan kepercayaan pemerintah (sistem politik menjadi empat tipe yaitu partisipasi aktif, partisipasi pasif tertekan (apatis), partisipasi militan radikal dan partisipasi pasif.

Partisipasi aktif, yaitu apabila seseorang memiliki kesadaran politik dan kepercayaan kepada pemerintah tinggi. Sebaliknya jika kesadaran politik dan kepercayaan kepada pemerintah rendah maka partisipasi politiknya cenderung pasif-tertekan (apatis). Partisipasi militan radikal terjadi apabila kesadaran politik tinggi tetapi kepercayaan kepada pemerintah cukup rendah. Dan apabila kesadaran politik cukup rendah tetapi kepercayaan terhadap pemerintah sangat tinggi maka partisipasi ini disebut tidak aktif (pasif).

Berbagai bentuk-bentuk partisipasi politik yang terjadi diberbagai Negara dapat dibedakan dalam kegiatan politik yang berbentuk konvensional dan nonkonvensional termasuk yang mungkin legal (petisi) maupun ilegal (cara kekerasan atau revolusi). Bentuk- bentuk dan frekuensi partisipasi politik dapat

dipakai sebagai ukuran untuk menilai stabilitas sistem politik, integritas kehidupan politik, kepuasan atau ketidakpuasan warga negara.

Bentuk-bentuk partisipasi politik yang kemukakan Mohtar Mas'ood yang terbagai dalam dua bentuk yaitu partisipasi politik konvensional dan partisipasi politik non konvensional. Adapun rincian bentuk partisipasi politik konvensional dan non konvensional.

1. Partisipasi politik konvensional adalah sebagai berikut :
 - a. Pemberian suara atau voting
 - b. Diskusi politik
 - c. Kegiatan kampanye
 - d. Membentuk dan bergabung dalam kelompok kepentingan
 - e. Komunikasi individual dengan pejabat politik atau administratif
2. Partisipasi politik nonkonvensional adalah sebagai berikut :
 - a. Pengajuan petisi
 - b. Berdemonstrasi
 - c. Konfrontasi
 - d. Tindakan kekerasan politik terhadap manusia.³²

Yang dapat diartikan sebagai partisipasi politik menunjukan berbagai bentuk dan intentitas, dapat dibagi perbedaan jenis partisipasi menurut frekuensi

³² https://eprints.uny.ac.id/23755/4/4_BAB%20II.pdf Jurnal yang diakses pada tanggal 19 Maret 2019

dan intensitasnya. Biasanya orang yang mengikuti kegiatan secara tidak intensif yaitu kegiatan yang tidak banyak menyita waktu dan yang biasanya tidak didasarkan prakarsa sendiri contohnya seperti memberikan hak suara dalam pemilihan umum yang besar sekali jumlahnya, sebaliknya kecil jumlahnya partisipasi orangnya yang secara aktif dan sepenuh waktu melibatkan diri dalam politik ini mencakup antara lain menjadi pimpinan partai atau kelompok kepentingan.³³

- a. Pertama adalah pemain *gladiators* mereka yang termasuk golongan ini yaitu orang-orang yang sangat aktif di dunia politik seperti anggota partai, anggota organisasi masyarakat dan lembaga non pemerintah yang aktif mengikuti perkembangan perpolitikan.
- b. Kedua adalah penonton *spectators* mereka yang termasuk di dalam golongan ini adalah 60% populasi masyarakat yang menggunakan hak pilihnya secara aktif.
- c. Ketiga adalah *apathetics* mereka yang termasuk di dalam golongan ini 33% populasi yang tidak aktif sama sekali dalam menggunakan hak pilihnya .

Piramida partisipasi politik lainya menurut David Roth dan Frank L. Willson melihat masyarakat terbagi atas empat pertama adalah Aktivis (*Activists*), kedua Partisipan (*Perticipats*), ketiga Penonton (*Onlookers*), dan keempat Apolitis (*Apoiticals*) yang menarik pada pembagian partisipasi menurut

³³ Budiardjo, Miriam. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta : PT. Gramedia Pusaka Utama. Hal 371

David dan Frank yaitu memasukan perilaku menimpang (*the deviant*) seperti pembunuhan politik, pembajakan dan terorisme di bagian puncak piramida.³⁴

2.2.4 Pengertian Partisipasi Semu dan budaya politik

a. Pengertian Partisipasi Semu

Partisipasi semu dalam penelitian ini hampir sama dengan budaya politik kaula, pengertian partisipasi semu sendiri dapat dimengerti sebagai perilaku dimana kondisinya masyarakat tidak peduli tentang persoalan politik seperti memilih pemimpin daerah tetapi mereka sangat aktif dalam memberi komentar ketika pemilihan sudah terselenggarakan. Seperti kata Larry Diamond partisipasi semu adalah ketika dimana keberadaan mekanisme demokrasi tak menjamin adanya demokrasi yang sebenarnya (hakiki) yang hakikatnya penyelewengan terhadap demokrasi.³⁵

Pergeseran corak perilaku memilih semacam itu tidak lepas dari perubahan-perubahan bahwa para calon yang mereka harapkan bisa melakukan perubahan-perubahan yang tidak bisa berbuat banyak. Kalaupun ada perubahan-perubahan yang memperoleh banyak keuntungan adalah para calon itu sendiri, harapan demikian berbeda dengan apa yang terjadi pada pemerintahan Orde Baru ketika saat itu para calon lebih banyak memfungsikan diri sebagai pergerakan sendiri seolah-olah memperoleh kepercayaan penuh dari para pemilihnya, di dalam

³⁴ David F. Roth dan Frank L. Wilson, *The Comparative Study of Politics*, edisi ke 2, Boston: Houghton Mifflin Company, 1976, hlm 159.

³⁵ Diamond, Larry. 2003. *Developing Democracy Toward Consolidation*. Yogyakarta: IRE Press.

situasi demikian para wakil rakyat tidak merasa perlu melakukan konsultasi dengan para konsituennya.

Tapi ketidakpuasan terhadap kinerja pemerintah atau para wakil itu tidak hanya diwujudkan dalam bentuk penghukuman ketidakpuasan itu juga melahirkan *distrust* tidak percaya dari para pemilih yang memicu pada suatu kepuasan untuk tidak ikut dalam pemilu dan terlibat dalam partisipasi politik lainnya. Dalam situasi demikian proses perubahan yang terjadi di Indonesia tidak saja belum mampu melahirkan adanya budaya politik kewarganegaraan. Akan tetapi melahirkan banyak pola budaya-budaya baru yang timbul akibat pergerakan masyarakat baik itu baik atau buruk yang mempengaruhi jalanya sistem ketatanegaraan di Indonesia.

b. Pengertian budaya politik kaula

Sebelum memahami apa itu politik kaula alangkah lebih baik untuk memahami dulu apa itu budaya politik, budaya politik sendiri merupakan sistem nilai dan keyakinan yang dimiliki bersama oleh masyarakat. Namun, setiap unsur masyarakat berbeda pula budaya politiknya, seperti antara masyarakat umum dengan para elitnya. Seperti juga di Indonesia, menurut Benedict R. O'G Anderson, kebudayaan Indonesia cenderung membagi secara tajam antara kelompok elite dengan kelompok massa.³⁶

Selanjutnya ada yang melihat bahwa budaya politik itu adalah suatu budaya politik dapat dilihat dari aspek doktrin dan aspek generiknya yang

³⁶ Arifin, Anwar. 2003. Komunikasi Politik, Paradigma-Teori-Aplikasi-Strategi Komunikasi Komunikasi Politik Indonesia. Balai Pustaka. Jakarta

menekankan pada isi atau materi, seperti sosialisme, demokrasi, atau nasionalisme dan (aspek generik) menganalisis bentuk, peranan, dan ciri-ciri budaya politik, seperti militan, utopis, terbuka, atau tertutup.

Maka dari itu model partisipasi semu dapat dikategorikan sebagai budaya politik kaula. Gabriel A. Almond mengajukan pengklasifikasian budaya politik diantaranya budaya politik kaula atau subyek yaitu masyarakatnya bersangkutan sudah relatif maju tapi masih bersifat pasif.³⁷

Jika ditelusuri lebih jauh dalam pembentukan budaya Miriam Budiardjo menyatakan bahwa salah satu aspek penting dalam sistem politik yang mencerminkan subyektif adalah dimana budaya politik keseluruhan dari pandangan-pandangan politik, seperti norma-norma, pola-pola orientasi terhadap politik dan pandangan hidup pada umumnya yang dimana budaya politik megutamakan dimensi psikologis dari suatu sistem politik, diantaranya sikap-sikap, sistem-sistem kepercayaan, simbol-simbol yang memiliki oleh individu-individu dan beroperasi di dalam seluruh masyarakat serta harapan-harapannya.³⁸

c. Orientasi dalam budaya politik

Dalam pendekatan perilaku politik terdapat interaksi antara manusia satu dengan lainnya yang akan selalu terkait dengan pengetahuan, sikap dan nilai seseorang yang kemudian memunculkan orientasi sehingga timbul budaya politik,

³⁷ Gabriel A. Almon and Bingham Powell, *Comprative Politic A Developmental Approach* dikutip Rusadi Kantrapawira, *Budaya Politik*, 25.

³⁸ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 2007), 49.

orientasi politik itulah yang kemudian membentuk tatanan dimana interaksi-interaksi yang muncul tersebut akhirnya mempengaruhi budaya politik seseorang.

Orientasi politik tersebut dapat dipengaruhi oleh orientasi individu dalam memandang obyek-obyek politik. Almond dan Verba mengajukan klasifikasi tipe-tipe orientasi politik, yaitu:³⁹

1. Orientasi kognitif, yaitu kemampuan yang menyangkut tingkat pengetahuan dan pemahaman serta kepercayaan dan keyakinan individu terhadap jalannya sistem politik dan atributnya, seperti tokoh-tokoh pemerintahan, kebijaksanaan yang mereka ambil, atau mengenai simbol-simbol yang dimiliki oleh sistem politiknya, seperti ibukota negara, lambang negara, kepala negara, batas-batas negara, mata uang yang dipakai, dan lagu kebangsaan negara.
2. Orientasi afektif, yaitu menyangkut perasaan seorang warga negara terhadap sistem politik dan peranannya yang dapat membuatnya menerima atau menolak sistem politik itu.
3. Orientasi evaluatif, yaitu menyangkut keputusan dan praduga tentang obyek-obyek politik yang secara tipikal melibatkan kombinasi standar nilai dan kriteria dengan informasi dan perasaan.

Perlu disadari bahwa dalam realitas kehidupan, ketiga komponen ini tidak terpisahkan-pisah tetapi saling terkait atau sekurang-kurangnya saling mempengaruhi

³⁹ Gabriel A. Almon and Bingham Powell, *Comprative Politic A Developmental Approach* dikutip Rusadi Kantrapawira, *Budaya Politik*, 27.

misalkan seorang warga negara dalam melakukan penilaian terhadap seorang pemimpin, ia harus mempunyai pengetahuan yang memadai tentang si pemimpin.

Berkaitan dengan sistem politik, kebudayaan politik masyarakat dipengaruhi oleh sejarah perkembangan sistem, di samping itu kebudayaan politik lebih mengutamakan dimensi psikologis suatu sistem, seperti sikap, sistem kepercayaan, atau simbol-simbol yang dimiliki dan diterapkan oleh individu-individu dalam suatu masyarakat sekaligus harapan-harapannya. Variabel yang ada bisa berawal dari suasana psikologis seseorang, argumentasi umum dalam jajaran psikologi sosial dan terminal terakhir bertumpu pada status sosial-ekonomi yang dimiliki oleh seseorang atau sekelompok orang sebagai determinan pembentukan orientasi sikap dan tingkah laku politik.

Almond dan Powell mencatat bahwa aspek lain yang menentukan orientasi politik seseorang adalah hal-hal yang berkaitan dengan “rasa percaya” (trust) dan “permusuhan” (hostility). Perasaan ini dalam realitas sosial berwujud dalam kerjasama dan konflik yang merupakan dua bentuk kualitas politik. Rasa percaya mendorong kelompok-kelompok dalam masyarakat untuk bekerjasama dengan kelompok lain. Sebaliknya rasa permusuhan akan mendorong seseorang atau suatu kelompok pada konflik politik.⁴⁰

Ketika diadakan Pemilu maka budaya politik yang ada pada masyarakat akan sangat berpengaruh terhadap perilaku memilihnya. Dalam hal ini masyarakat akan bersikap rasional bersikap pragmatis bersikap apatis (acuh tak

⁴⁰ Alfian dan Nazaruddin Sjamsuddin : Koleksi Buku 1991 Profil budaya politik Indonesia (: Jakarta : Pustaka Utama Grafiti 1991 hal : 22-23

acuh) ataukah mereka memang sudah mempunyai kesadaran politik untuk memilih wakil rakyat yang ada didaerahnya dalam Pemilu. Kemudian ketika berbicara budaya politik dalam suatu negara tentu terdapat faktor-faktor yang turut mempengaruhi budaya politik yang berkembang pada suatu negara di antaranya:

1. Karakter nasional, misalnya saja orang-orang Indonesia berbeda dengan orang-orang Malaysia, Thailand, ataupun Filipina, meskipun barangkali mereka adalah serumpun. Karena orang-orang Indonesia memiliki karakter atau ciri-ciri tersendiri yang berbeda dengan bangsa lain.
2. Orientasi terhadap kekuasaan.
3. Rekrutmen pemimpin, dalam hal ini adalah cara-cara yang digunakan oleh para calon pemimpin yang tadinya hanya merupakan orang biasa untuk mendapatkan kekuasaan politik yang merupakan aspek signifikan dalam budaya politik suatu bangsa.
4. Gaya politik, sikap individu terhadap proses politik dan pandangannya mengenai hubungannya itu memberi perbedaan gaya pada budaya politiknya.⁴¹

Sehingga, budaya politik yang dimiliki oleh masing-masing negara tentu berbeda satu sama lain, seperti halnya budaya politik yang terdapat di negara Indonesia juga berbeda dengan budaya politik yang terdapat di negara lain. Hal ini

⁴¹ Winarno, Budi. 2002. Kebijakan Publik: Teori dan Proses. Media Presindo: Yogyakarta.

sangat dipengaruhi oleh sejarah kebangsaan dan proses yang terus berlangsung dalam aktivitas ekonomi sosial dan juga politik.

Dalam kehidupan masyarakat, tidak menutup kemungkinan bahwa terbentuknya budaya politik merupakan gabungan dari semua klasifikasi tersebut di atas. Tentang klasifikasi budaya politik di dalam masyarakat lebih lanjut dibahas sebagai berikut:

1. Budaya Politik Subjek/ Kaula

Dalam budaya politik sistem Subjek atau kaula ini memiliki ciri khas diantaranya :

- a) Terdapat frekuensi orientasi politik yang tinggi terhadap sistem politik yang diferensiatif dan aspek output dari sistem itu, tetapi frekuensi orientasi terhadap obyek-obyek input secara khusus, dan terhadap pribadi sebagai partisipan yang aktif mendekati nol.
- b) Para subyek menyadari akan otoritas pemerintah
- c) Hubungannya terhadap sistem politik secara umum, dan terhadap output, administratif secara esensial merupakan hubungan yang pasif.
- d) Sering wujud di dalam masyarakat di mana tidak terdapat struktur *input* yang terdiferensiansikan.
- e) Orientasi subyek lebih bersifat afektif dan normatif daripada kognitif.

Menurut Almond dan Verba ketiga macam budaya politik tersebut sudah mengalami perubahan metode dan cara praktek di lapangan yang menjadi budaya

campuran atau budaya kompleksitas. Munculnya budaya kompleksitas ini telah melahirkan teori maupun paham baru dalam budaya politik seperti :

- a. Budaya politik subyek-parokial (the parochial- subject culture)
- b. Budaya politik subyek-partisipan (the subject-participant culture)
- c. Budaya politik parokial-partisipan (the parochial-participant culture).⁴²

Berdasarkan sikap yang di tunjukkan pada negara yang memiliki sistem ekonomi dan teknologi yang kompleks menuntut kerja sama yang luas untuk memperpadukan modal dan keterampilan sikap jiwa para pekerjanya yang dapat di ukur dari sikap orang terhadap orang lain. Pada kondisi ini budaya politik memiliki kecenderungan sikap “militan” atau sifat “toleransi”.

a. Budaya Politik Militan

Budaya politik dimana perbedaan tidak dipandang sebagai usaha mencari alternatif yang terbaik, tetapi dipandang sebagai usaha jahat dan menantang. Bila terjadi krisis, maka yang dicari adalah kambing hitamnya, bukan disebabkan oleh peraturan yang salah, dan masalah yang mempribadi selalu sensitif dan membakar emosi.

b. Budaya Politik Toleransi

Budaya politik dimana pemikiran berpusat pada masalah atau ide yang harus dinilai, berusaha mencari konsensus yang wajar yang mana selalu membuka pintu untuk bekerja sama. Sikap netral atau kritis terhadap ide orang, tetapi bukan curiga terhadap orang.

⁴² Nimmo, Dan. 2006. Komunikasi Politik : Khalayak dan Efek. Rosdakarya. Bandung

Jika pernyataan umum dari pimpinan masyarakat bernada sangat militan, maka hal itu dapat menciptakan ketegangan dan menumbuhkan konflik. Kesemuanya itu menutup jalan bagi pertumbuhan kerja sama. Pernyataan dengan jiwa toleransi hampir selalu mengundang kerja sama. Berdasarkan sikap terhadap tradisi dan perubahan, budaya politik terbagi atas :

a. Budaya politik memiliki mental absolut

Budaya politik yang mempunyai sikap mental yang absolut memiliki nilai-nilai dan kepercayaan yang dianggap selalu sempurna dan tak dapat diubah lagi. Usaha yang diperlukan adalah intensifikasi dari kepercayaan, bukan kebaikan. Pola pikir demikian hanya memberikan perhatian pada apa yang selaras dengan mentalnya dan menolak atau menyerang hal-hal yang baru atau yang berlainan (bertentangan). Budaya politik yang bernada absolut bisa tumbuh dari tradisi, jarang bersifat kritis terhadap tradisi, malah hanya berusaha memelihara kemurnian tradisi. Maka, tradisi selalu dipertahankan dengan segala kebaikan dan keburukan. Kesetiaan yang absolut terhadap tradisi tidak memungkinkan pertumbuhan unsur baru.

b. Budaya politik yang memiliki sikap mental akomodatif

Struktur mental yang bersifat akomodatif biasanya terbuka dan sedia menerima apa saja yang dianggap berharga. Ia dapat melepaskan ikatan tradisi, kritis terhadap diri sendiri, dan bersedia menilai kembali tradisi berdasarkan perkembangan masa kini.

Tipe absolut dari budaya politik sering menganggap perubahan sebagai suatu yang membahayakan. Tiap perkembangan baru dianggap sebagai suatu tantangan yang berbahaya yang harus dikendalikan. Perubahan dianggap sebagai penyim-pangan. Tipe akomodatif dari budaya politik melihat perubahan hanya sebagai salah satu masalah untuk dipikirkan. Perubahan mendorong usaha perbaikan dan pemecahan yang lebih sempurna.⁴³

Adapun ciri- ciri budaya politik kaula diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Adanya minta, Kesadaran, dan Perhatian terhadap sistem politik.
2. Adanya pengertian dan pemahaman terhadap hal-hal yang menjadi kebijakan pemerintah
3. Adanya Partisipasi yang pasif dalam pengambilan kebijakan
4. Bila tidak menyukai sistem politik yang berlaku, masyarakat hanya diam dan menyimpan perasan.
5. Tingkat sosial dan ekonomi masyarakat relatif maju, tetapi hubungan masyarakat dengan sistem politik bersifat pasif
6. Adanya kesadaran masyarakat terhadap otoritas pemerintah
7. Masyarakat secara umum patuh, menerima, loyal dan setia terhadap aturan pemerintah serta kebijakan pemimpinya.

⁴³ Nimmo, Dan. 2006. Komunikasi Politik : Khalayak dan Efek. Rosdakarya. Bandung
hal : 22

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif. Menurut Sugiyono bahwa penelitian kualitatif deskriptif adalah metode penelitian yang berlandaskan dengan hal-hal yang nyata yang biasanya digunakan untuk meneliti kondisi yang objektif yang alamiah di mana peneliti berperan sebagai instrumen kunci. Tujuan penelitian deskriptif analisis adalah untuk membuat gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau daerah tertentu. Di samping itu, penelitian ini juga menggunakan teori-teori, data-data dan konsep-konsep sebagai kerangka acuan untuk menjelaskan hasil penelitian menganalisis dan sekaligus menjawab persoalan yang diteliti.⁴⁴

3.2 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kota Banda Aceh tepatnya di kecamatan Kuta Raja yang merupakan salah satu Kecamatan dengan tingkat golput tertinggi dari 9 kecamatan yang ada di kota Banda Aceh yang cukup tinggi angka golputnya adalah kecamatan Kuta Raja 47.7%. Jadi peneliti tertarik untuk untuk mengkaji kenapa banyak masyarakat di kecamatan Kuta Raja memilih Golput.

3.3 Pendekatan Penelitian

⁴⁴ Sugiyono, 2008. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D diakses pada tanggal 08 november 2018 dari situs <http://digilib.unila.ac.id/7405/16/BAB%20III.pdf>

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Metode penelitian kualitatif adalah penelitian dimana peneliti mencurahkan kemampuan sebagai pewawancara atau pengamat yang empatik untuk mengumpulkan data yang unik tentang permasalahan yang sedang ditelitinya.⁴⁵

Berdasarkan uraian tersebut dapat dikemukakan bahwa penelitian deskriptif ini berusaha menggambarkan objek penelitian berdasarkan fakta, data, kejadian dan berusaha menghubungkan kejadian-kejadian atau objek sekaligus serta menganalisisnya berdasarkan konsep-konsep yang telah dikembangkan sebelumnya sehingga memudahkan peneliti dalam memecahkan masalah.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *rational choices*. *Rational choice* adalah individu sebagai aktor terpenting dalam dunia politik mereka menganggap sebagai makhluk rasional yang selalu mempunyai tujuan-tujuan yang mencerminkan apa yang dianggapnya kepentingan diri sendiri. Dan melakukan-melakukan hal itu dalam situasi terbatas sumber daya dan karena itu ia perlu membuat pilihan untuk menetapkan sikap dan tindakan yang efisien. Ia harus memilih diantara beberapa alternatif dan menentukan mana yang akan membawa keuntungan dan kegunaan yang paling maksimal baginya.⁴⁶

3.4 Informan Penelitian

⁴⁵ Bagong Suyanto. 2005. Metode Penelitian Sosial : Berbagai alternatif pendekatan. Jakarta : Perdana Media Hal 228

⁴⁶ Mariam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, .hal 92

Informan adalah orang yang dapat memberikan informasi pada penelitian yang dilakukan oleh penulis serta dapat dijadikan sebagai sumber data penelitian atau biasa disebut dengan narasumber atau informan adalah orang yang diwawancarai, diminta informasi oleh pewawancara dan informan adalah orang yang diperkirakan menguasai dan memahami data, informasi ataupun fakta dari suatu objek penelitian.⁴⁷

Penentuan informan dilakukan secara purposive sampling, yaitu teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu yakni sumber data dianggap penting tentang apa yang diharapkan, sehingga mempermudah peneliti menjelajahi objek atau situasi sosial yang sedang diteliti.⁴⁸

3.5 Sumber Data

Data merupakan bahan mentah yang terlebih dahulu diolah sehingga dapat memberikan informasi atau keterangan, baik bersifat kualitatif maupun kuantitatif yang menunjukkan fakta dan data juga dapat juga didefinisikan sebagai kumpulan fakta atau angka ataupun segala sesuatu yang dapat dipercaya kebenarannya sehingga dapat digunakan sebagai dasar untuk menarik kesimpulan.⁴⁹ Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari objek penelitian, dapat berupa wawancara atau observasi. Menurut syofian data primer adalah data

⁴⁷ Burhan Bugin. 2001. *Penelitian Kualitatif : Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial*. Jakarta : Kencana Prenama Media Grub. Hal 111.

⁴⁸ Sugiono. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung alfabeta. Hal 2018.

⁴⁹ Sofian siregar, *Metode Penelitian Kuantitati..*, Hlm: 16

yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau dari tempat objek penelitian dilakukan.⁵⁰ Dalam penelitian ini data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan sumber informan, yaitu Direktur, wakil direktur administrasi umum dan keuangan, pegawai bagian pelayan akademik, pegawai bagian penunjang medik dan pasien.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh melalui media perantara atau secara tidak langsung yang berupa buku, catatan, bukti yang telah ada, atau arsip baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan secara umum peneliti membutuhkan pengumpulan data dengan cara berkunjung ke perpustakaan, pusat kajian, pusat arsip atau membaca banyak buku yang berhubungan dengan penelitiannya.

3.6 Teknik pengumpulan data

Pengumpulan data dilakukan untuk mendapatkan informasi dan mengumpulkan data guna untuk menjelaskan fenomena yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan. Perlu ditegaskan di sini bahwa hal sangat penting yang akan dipahami oleh setiap peneliti adalah alasan mengapa masing-masing teknik tersebut dipakai, untuk memperoleh informasi apa, dan pada bagian fokus masalah mana yang memerlukan teknik wawancara, mana yang memerlukan teknik observasi, mana yang harus kedua-duanya dilakukan. Pilihan teknik sangat tergantung pada jenis informasi yang diperoleh. Dan teknik pengumpulan data diantaranya:

⁵⁰ Ibid. hlm : 16

a. Wawancara

Menurut emzir wawancara ialah proses komunikasi atau interaksi untuk mengumpulkan informasi dengan cara tanya jawab antara peneliti dengan informan atau subjek penelitian.⁵¹

Metode pengambilan data dilakukan dengan cara wawancara langsung yang ditujukan untuk menggali informasi secara lebih mendalam terkait permasalahan penelitian. Terkait penelitian, peneliti menggunakan metode *indepth interview*, dimana peneliti dan informan atau responden berhadapan langsung (*face to face*) untuk mendapatkan informasi secara lisan dengan tujuan data yang dapat menjelaskan permasalahan penelitian. Untuk membuat wawancara yang berisi butir-butir pertanyaan terkait permasalahan penelitian. Adapun peneliti memilih masyarakat Kecamatan Kuta Raja sebagai informan karena menjadi peserta yang ikut dalam Pilkada Walikota Banda Aceh 2017.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah informasi yang berasal dari catatan penting baik dari lembaga atau organisasi maupun dari perorangan. Dokumentasi penelitian ini merupakan pengambilan gambar oleh peneliti untuk memperkuat hasil penelitian.⁵²

3.7 Analisis Data

⁵¹Emzir. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

⁵² Hamidi, Metode penelitian Kualitatif, 2004 diakses pada tanggal 12 agustus 2018 dari situs <http://repository.unika.ac.id/190/7/10.30> 0159%20Setia%20Yudiano%20DAFTAR%20PUSTAKA.pdf

Tahap awal yang dilakukan penulis dalam pengumpulan dan analisis data yakni dengan cara meminta data atau file pada dinas-dinas yang telah di paparkan sebelumnya dan pada tahap kedua setelah penulis mendapatkan data kemudian mewawancarai informan atau narasumber baik itu primer maupun sekunder, tahap ketiga penulis mengambil pokok-pokok pembahasan dari buku, artikel, jurnal, skripsi dan sebagainya yang berkaitan dengan golongan putih.

Data yang dikumpulkan diolah dan kemudian dianalisis untuk dapat disimpulkan sebagai hasil penelitian. Metode analisa data adalah metode deskriptif yaitu suatu metode dimana data yang diperoleh disusun dan kemudian diinterpretasikan sehingga memberikan keterangan terhadap masalah-maslah yang aktual berdasarkan data-data yang sudah terkumpul dari penelitian.

Data-data yang diperoleh akan dianalisis secara kualitatif, yaitu dengan tidak menggunakan model statistik dengan menggunakan rumus-rumus tertentu. Melainkan lebih ditunjukan sebagai tipe penelitian deskriptif. Kumpulan hasil wawancara sejauh mungkin akan ditampilkan untuk mendukung analisis yang disampaikan. Data yang telah dikumpulkan diatur secara beruntun, dalam suatu pola, di kategorikan dan diuraikan ke dalam satuan uraian dasar sehingga ditemukan maslah dan dapat dirumuskan hipotets seperti yang di sarankan oleh data.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Kecamatan Kuta Raja Kota Banda Aceh

Kecamatan kuta raja merupakan salah satu kecamatan dari sembilan kecamatan yang berada dalam wilayah kota Banda Aceh, kecamatan ini merupakan pecahan dari kecamatan kuta alam yang memulai terpisah dari kecamatan induknya pada tahun 2000.⁵³ Kecamatan kuta raja terdiri atas 6 gampong sebagai berikut :

1. Gampong Lampaseh Kota
2. Gampong Merduati
3. Gampong Keudah
4. Gampong Peulanggahan
5. Gampong Jawa
6. Gampong Pande

Dalam sejarah gampong jawa merupakan salah satu kemukiman tertua yang menjadi asal mula Kota Banda Aceh sederetan sejarah peninggalan terukir di sana mulai dari makam raja-raja Aceh tempo dulu. Letak Geografis kecamatan Kuta Raja sendiri memiliki luas 5,21km (521,1 Ha)⁵⁴.

Secara garis besar kondisi sosial budaya secara amatan penulis setelah melakukan penelitian di sana,kuta raja memiliki kebudayaan yang multikultur karena berdekatan langsung dengan gampong keudah yang dikenal sebagai

⁵³bpskotabandaaceh diakses pada tanggal 17 agustus 2019 dari situs https://sipd.kemendagri.go.id/dokumen/uploads/rkpd_8_2016.pdf

⁵⁴BPS Banda Aceh dalam Angka Tahun 2019

daerah perdagangan tidak jarang juga bisa di jumpai orang-orang yang beretnis thionghoa yang beragama di sana juga bisa di jumpai satu tempat peribadahtan (wiraha) mereka, warga aceh sendiri sudah terbiasa hidup berdampingan dengan mereka.

Selanjutnya banyak masyarakat asli di sana sudah banyak menjadi korban bencana Tsunami Aceh tahun 2004 dikarenakan kecamatan ini sangat dekat dengan lautan banyak masyarakat pendatang yang tinggal di sana, di gampong jawa sendiri terdapat tempat pembuangan akhir seluruh sampah yang ada di kota banda aceh yang menambah kesan kumuh di daerah ini.⁵⁵

Banyak terdapat bale-bale tempat pengajian menandakan kuta raja aktif dalam pengajian rutin malam, walaupun mereka multikultur mereka sangat menentang yang namanya perbedaan terutama pemahaman-pemahaman yang sesat pernyataan ini di dukung oleh pemuda gampung sana yang saya jumpai yang mengatakan sebagai berikut :

“Jangankan di sini di manapun kan fanatik agama itu di jaga, apa lagi sekarang ada kabar banyak pemahaman-pemahaman sesat kaya wahabi, kami sangat menentang keberadaan mereka. kmren perah ada datang kesini janggut nya panjang-panjang ya kami usir karna sempat meresahkan, sekarang ini was was itu golok ada di siapkan untuk jaga-jaga”⁵⁶

Di gampong jawa sendiri tak jarang di jumpai dermaga boat-boat yang sibuk melakukan rutinitas nelayan keseluruhan seperti memperbaiki kapal, membuat kapal serta menurunkan muatan hasil melaut banyak pemuda-

⁵⁵ <https://aceh.antaranews.com/berita/62725/tpa-kampung-jawa-kelebihan-kapasitas> di akses pada 31 Oktober 2019

⁵⁶ Wawancara dengan Khumaidi yang berada di gampong Jawa pada tanggal 18 Februari 2019.

pemuda di sana yang aktif dalam pekerjaan ini. Secara Garis besar bisa di lihat kondisi ekonomi kecamatan Kuta Raja dari hasil pantauan saya yang di dukung oleh data yang saya dapatkan sebagai berikut :

Table 1 : Kondisi Ekonomi, Pengangguran dan Kemiskinan

Nama	2018
Kondisi Ekonomi	8,18%
Pengangguran	5,5%
Kemiskinan	6,55%

Bedasarkan tabel di atas, dapat kita lihat bahwa pertumbuhan ekonomi di kota banda aceh sendiri terutama Kuta raja pada tahun 2018 sekitaran 8,18%.⁵⁷ Hal ini menandai bahwa keadaan ekonomi tahun 2018 masih di bawah garis standar kesejahteraan ekonomi nasional. Tingkat kemiskinan sendiri jika di lihat dari tabel di atas menunjukan bahwa tingkat kemiskinan di sana masih tinggi tak jarang saya jumpai-jumpai rumah tidak layak huni di sekitaran gampong dekat TPA di gampong jawa sendiri, tingkat pengangguran sendiri yaitu pada tahun 2018 itu sekitaran 5,5%⁵⁸ hal ini dapat mempengaruhi budaya partisipasi dan memilih karena hal tersebut yang akan membawa pemilih ke arah budaya politik kaula.

Selanjutnya seperti yang telah di kemukakan oleh seorang ahli ekonomi bedasarkan teori Artur Okun tentang adanya hubungan negatif antara pertumbuhan ekonomi dan pengangguran ini sendiri dapat di simpulkan bahwa

⁵⁷ bpskotabandaaceh diakses pada tanggal 17 agustus 2018 dari situs https://sipd.kemendagri.go.id/dokumen/uploads/rkpd_8_2016.pdf

⁵⁸ BPS Banda Aceh dalam Angka Tahun 2018

tingkat pengangguran semakin meningkat akan menambah jumlah penduduk yang tidak berkerja sehingga mereka tidak mempunyai pendapatan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari mereka yang akan mendorong kepada banyaknya penduduk yang miskin.

Bedasarkan dari hasil amatan saya yang telah saya lakukan sebelumnya di lapangan bahwa pekerjaan masyarakat kecamatan Kuta Raja yang di dapatkan dengan hasil wawancara dengan responden adalah sebagai berikut :

Table 2 : Pekerjaan Masyarakat Kecamatan Kuta Raja

Pns	5%
Pedagang	30%
Nelayan	50%
Pengangguran	15%

Dari hasil penelitian dari beberapa responden yang saya temui , bisa di lihat di table 2 di atas sebagian dari masyarakat Kuta Raja yang berkerja sebagai nelayan. Karena daerah Kuta Raja sendiri dekat dengan laut maka pencarian utama mereka di laut . Masyarakat yang berkerja sebagai pedagang itu berkisar sebesar 30% . sedangkan yang pekerjaannya sebagai PNS sekitar 2% dan masyarakat yang tidak bekerja atau pengangguran sekitar 13%.

Dari hasil riset yang saya simpulkan sebelumnya tentang apa saja janji-janji masa kampanye yang tidak di tepati yang ditawarkan oleh calon kandidat

yang akan bertarung di pilkada walikota banda aceh tahun 2017 adalah sebagai berikut :

1. Di janjikan akan diberikan bantuan untuk merenovasi rumah.
2. Bantuan perternakan seperti anak bebek, anak ayam sebanyak 20 ekor
3. Bantuan ibu melahirkan
4. Bantuan untuk orang meninggal
5. bantuan untuk nelayan seperti jaring dan uang operasional kesejahteraan nelayan.

Secara umum presentase, golput di Kota Banda Aceh pada tahun 2017 berdasarkan dari berbagai sumber data yang ditemukan adalah sebagai berikut :

Table 3 : Gambaran Partisipasi pada Pilkada Walikota Banda Aceh 2017.⁵⁹

Pemilih	Laki-laki	Perempuan	Total
Jumlah Pemilih	72.735	74.845	149.224
Penguna hak pilih	43.542	47.444	93.569
Partisipasi	59,9%	63,4%	62,7%

Bedasarkan table diatas , dapat kita lihat bahwa tingkat partisipasi di Kota Banda Aceh pada saat pilkada 2017 berlangsung 62,7% yang memberikan hak suaranya dan bisa dilihat juga pemilih perempuan lebih besar tingkat

⁵⁹ Kip Kota Banda aceh.com

Partisipasinya ketimbang laki-laki jika dilihat dari jumlah total keseluruhan partisipasi perempuan, dari jumlah tersebut maka ada angka 37,3 % suara yang tidak sah atau golput. Jika dikapitulasikan golput yang terbagi di sub wilayah yang ada di Kota Banda Aceh sebagai berikut :

Table 4 : Gambaran Sub wilayah Golput pada Pilkada Kota Banda Aceh 2017.⁶⁰

No	Kecamatan	Pemilih	Penguna Hak pilih	Partisipasi
1	Baiturrahman	20.546	13.607	66.2%
2	Banda Raya	14.577	10.218	70.1%
3	Jaya Baru	14.636	8.357	57.1%
4	Kuta Alam	29.244	16.744	57.3%
5	Kuta Raja	8.960	4.686	52.3 %
6	Lung Bata	15.136	9.667	63.9 %
7	Syiah Kuala	19.191	12.048	62.8 %
8	Meuraxa	12.380	12.048	68.2 %
9	Ulee Kareng	14.560	9.804	67.3%

4.2. Political Ditrust dan Golput di Kota Banda Aceh.

⁶⁰ Kip Kota Banda Aceh.com

Dari hasil penelitian saya mengungkap bahwa masyarakat kecamatan Kuta Raja golput di sebabkan oleh beberapa hal yang membuat masyarakat disana memiliki masalah sendiri terutama soal pengalaman yang membentuk political distrust yang menyebabkan hal tersebut melahirkan masyarakat yang golput, diantaranya sebagai berikut

a. Pelayanan Publik

Banyak responden yang berprofesi sebagai nelayan mengeluhkan susah nya akses perizinan kapal yang membuat mereka menjadi tidak percaya lagi terhadap pemerintahan hal ini melahirkan trauma tersendiri sehingga mereka menarik kepercayaanya di ajang 5 tahunan tersebut seperti kata salah satu warga yang saya wawancarai yang berprofesi sebagai nelayan yang mengatakan sebagai berikut :

“Perubahan setelah Pilkada yang saya rasakan pemerintahan masih berfokus kepada rekonstruksi bangunan. Bagian kemasyarakatan contohnya saja surat menyurat soal perizinan kapal masih rumit padahal pemerintah sudah satu atap tapi tetap rumit, kami kan butuh itu dipermudah. Yang nelayan butuhkan dipermudahkan akses perizinan kapal itu saja tapi sekarang malah dipersulit, pungli dimana-mana, lihat aja itu boat yang kami buat di samping itu ngak keluar-keluar izin nya udah 3 tahunan juga terbengkalai kan kasian”⁶¹

Dapat di simpulkan bahwa selama ini masyarakat sudah sering di buat kecewa oleh pelayanan publik yang rumit tidak jarang juga pungli yang dilakukan oleh instansi pemerintahan menambah kesulitan pengurusan administrasi sehingga hal tersebut membuat banyak para nelayan menjadi tidak percaya terhadap pemerintahan dan juga sistem yang menciptakan pemerintahan yang baru seperti

⁶¹ Wawancara dengan bapak Safrizal yang berada di Gampong Jawa pada tanggal 18 Februari 2019

pilkada. Hal ini juga di dukung oleh salah satu hasil wawancara saya dengan salah satu nelayan yang bernama bapak mustafa juga yang memiliki trauma sendiri untuk memilih ia menganggap lebih baik melaut ketimbang ke (TPS) Tempat Pemilihan Suara sebagai berikut :

“ Perlu di pahami bahwa sebagai nelayan kami mencari uang itu kelaut untuk sehari makan,jika kami tidak pergi kelaut maka kami kelaparan. Kadang juga kami pergi kelaut pilkada tinggal 5 hari lagi, kami tidak bisa menunggu, susah untuk nelayan untuk bisa sepenuhnya memilih karna kami sedang berkerja”⁶²

Rasa kecewa dan tidak puas terhadap kepemimpinan periode yang lalu berdampak pada sikap pemilih pada masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya, masyarakat menjadi keberatan untuk memilih seperti kata bapak agus ialah salah satu nelayan di gampong jawa yang mengatakan sebagai berikut :

“Kami sebagai nelayan sudah kompak untuk tidak memilih lagi karena kami kecewa banyak keinginan nelayan yang sampai sekarang tidak di beri oleh pemerintahan, cuman di masa bapak SBY kami kompak untuk tidak kelaut dan ke TPS karna pada saat itu kesejahteraan nelayan masih tinggi sekarang tidak lagi”⁶³

b. Janji – janji masa politik yang tidak kunjung di berikan.

Rasa sikap sakit hati juga selalu mewarnai setiap penyelenggaraan pilkada dimana pun, terutama di Kecamatan Kuta Raja sendiri banyak janji-janji yang sudah di jelaskan di atas tidak terpenuhi bahkan janji hanya sebatas pendongkrak suara kandidat yang tidak bertanggung jawab guna memenagkannya pada pemilihan nantinya, rasa sakit hati ini terjadi karena masyarakat terlalu

⁶² Wawancara dengan bapak Mustafa yang berada di Gampong Jawa pada tanggal 18 Februari 2019

⁶³ Wawancara dengan bapak Agus yang berada di Gampong Jawa pada tanggal 18 Februari 2019

mengharapkan dan percaya terhadap janji-janji politik masa kampanye yang tidak terpenuhi selepas calon itu terpilih nantinya seperti ungkapan salah satu warga yang saya wawancarai yang bernama ibu Maryani adalah IRT yang tidak lagi berkerja sebagai berikut :

*“ Kami ini orang miskin layak untuk dapat bantuan, di setiap pemilihan umum dulu biasanya ada saja timses yang minta kk (kartu keluarga) serta foto rumah katanya nanti akan dibedah rumah ibuk, ada juga sebebrapa yang datang dari timses lain yang melakukan hal yang sama tapi kenyataan nya sampai sekarang tidak ada renovasi apa-apa sakit hati saya makanya udah malas memilih tak ada perubahan yang saya rasakan ”.*⁶⁴

Selanjutnya pada hakikatnya setiap warga negara Indonesia memiliki hak untuk memilih atau tidak di setiap pilkada, akan tetapi sebagian masyarakat memilih tidak menggunakan haknya terutama karena mereka menilai banyak janji-janji masa kampanye yang tidak diberikan hal tersebut menjadikan pragmatisme tersendiri yang menilai bahwa pemerintah gagal dalam mensejahterakan mereka janji-janji masa kampanye hanya pemanis pilkada belaka seperti kata salah seorang warga gampong peudada ibu Maryamah yang berprofesi sebagai pedagang sebagai berikut :

*“ Kalau di lihat sekarang ini ya makin susah setelah pilkada sesesai banyak bantuan-bantuan yang awalnya ada udah di tarik tidak ada lagi sekarang contohnya saja raskin (beras miskin) dulu saya ada dapat itu sekarang sudah tidak ada lagi apa pemerintah sekarang sangat arogan kalau kami minta bantuan langsung datang ke pendopo banyak alasan supaya kami tidak bisa menjumpai beliau katanya bapak lagi keluar kota lah, seingat saya kemarin ada juga janji jika anak baru lahir dapat santunan 5 juta sampe sekarang tidak dijanjikan dapat ya dapat cuman kisaran 1 juta dalam bentuk peralatan bayi ”.*⁶⁵

⁶⁴ Wawancara dengan ibu Maryani yang berada di Gampong Peudada pada tanggal 20 Februari 2019

⁶⁵ Wawancara dengan ibu Maryamah yang berada di Gampong Peudada pada tanggal 20 Februari 2019

Janji-janji tersebut dijalankan ketika calon terpilih nantinya tapi malah sebaliknya masyarakat selalu dibuat kecewa karena hal ini menjadi penilaian sendiri terhadap rasa kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah yang sedang berlangsung dan akan terpilih kembali ketika pilkada nantinya. Selanjutnya rasa kecewa dan tidak puas terhadap kepemimpinan periode yang lalu berdampak pada sikap memilih pada masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya, masyarakat menjadi keberatan untuk memilih kembali untuk calon pemimpin kedepannya seperti kata ibu ida amin yang tidak memiliki pekerjaan sebagai berikut :

*“Di saat kampanye kemarin mereka selalu memberikan sembako gratis melakukan pendekatan terhadap masyarakat sini sempat juga membuat acara supaya tujuannya masyarakat menilai mereka peduli terhadap kami, setelah mereka terpilih mereka tidak pernah lagi melakukan hal yang sama. Itu semata-mata hanya untuk mengambil hati kami semasa kampanye saja”.*⁶⁶

Setiap orang yang mencalonkan diri sebagai calon pemimpin selalu menggunakan hak pilih masyarakat sebagai senjata untuk mencari lembung suara hal ini selalu menjadi pada setiap kampanye yang dilakukan berupa janji-janji yang tidak akan terrealisasikan nantinya ketika mereka terpilih.

c. Faktor perekonomian dan kekecewan

Seperti yang telah di kemukakan di atas bahwa kondisi perekonomian di suatu daerah sangat mempengaruhi penentu kesejahteraan dan perilaku memilih masyarakat kecamatan kuta raja sendiri banyak orang yang menganggap bahwa bekerja lebih baik ketimbang memilih karna pekerjaan sudah menjadi pendapatan yang pasti , jika mereka tidak bekerja sehari maka esoknya kebutuhan tidak

⁶⁶ Wawancara dengan ibu Ida yang berada di gampong Peulangahan pada tanggal 14 Februari 2019.

terpenuhi seperti kata seorang mursalin yang merupakan PNS di desa pedada yang menilai bahwa kondisi tersebut sangat mempengaruhi hak pilih di sana :

*“Tingkat pendidikan dan ekonomi yang rendah sangat mempengaruhi hasil pemilu, bukan hanya pemilih berpendidikan dan ekonomi yang rendah menjadi golput, mereka yang paham pendidikan pun juga ikut golput. Biasanya yang berpenghasilan minim ya lebih baik berkerja ketimbang memilih”.*⁶⁷

Di samping hal tersebut juga ada masyarakat yang kecewa terhadap sistem pemilu yang dianggap kurang terbuka yang menjadikan hal tersebut menjadi sikap apatis, apatis sendiri adalah sikap yang tidak peduli terhadap terselenggaranya pemilu yang sedang berlangsung banyak masyarakat memilih diam ketimbang ikut untuk berpartisipasi memilih dan memberikan perhatian terhadap pemerintahan seperti kata seorang narasumber yang saya wawancari bapak fauzan penganguran sebagai berikut :

*“ masyarakat kaya kami ini malas memilih, kami sibuk bantu istri berjualan tapi jika ada bantuan kami selalu menerimanya kaya rak ini, ini diberikan dengan timses dulu”.*⁶⁸

Di samping itu pula banyak masyarakat yang jenuh terhadap hasil pemilu, banyak hasil pemilu yang mereka angap tidak mampu mengubah nasib mereka oleh karena hal tersebut legitimasi kepercayaan yang di terima oleh pasangan calon bisa baik bisa buruk tergantung penilaian masyarakat itu sendiri. Hal ini karena pemenag terdahulu kurang menghasilkan kinerja yang dinilai kurang baik tidak memihak terhadap masyarakat seperti kata seorang narasumber yang bernama busra yang merupakan pedagang sebagai berikut :

⁶⁷ Wawancara dengan Mursalin yang berada di gampong peudada pada tanggal 15 Februari 2019

⁶⁸ Wawancara dengan Fauzan yang berada di gampong peudada pada tanggal 15 Februari 2019

*“ Saya sudah jenuh terhadap hasil pemilu yang hasilnya tidak sesuai harapan begitu-begitu saja tidak ada hal yang memang berdampak tertentu terhadap perekonomian kami kehidupan yang saya rasakan sekarang biasa-biasa saja , ini calon yang menang tidak sesuai harapan saya, ini semua permainan ”.*⁶⁹

Rasa kecewa juga dirasakan oleh para nelayan banyak nelayan yang tidak puas terhadap kepemimpinan periode yang lalu berdampak pada sikap memilih mereka yang menjadikan hal tersebut menjadi tidak percaya terhadap pemerintah mereka keberatan untuk memilih seperti kata seorang bapak Junaidy yang berprofesi sebagai nelayan sebagai berikut :

*“ kami sebagai nelayan sudah kompak untuk tidak memilih ya karena kami kecewa terhadap pemerintahan yang ada lebih diutamakan sektor-sektor lain yang saya tak tau, jarang ada kebijakan . ini malah banyak mafia-mafia yang mengelola TPI (tempat pelelangan ikan) Lampulo jadi yang masuk kesana hanya toke-toke besar yang seperti kami tidak bisa seharusnya pemerintah turun tangan menanggapi hal ini, ini tidak ”.*⁷⁰

4.3. Partisipasi Semu dan Budaya Politik Memilih Pada Pilkada Wali Kota Banda Aceh

Partisipasi semu yang di praktikan oleh masyarakat kuta raja berdasarkan pengamatan penulis setelah melakukan penelitian sebagai berikut :

a. Pro aktif dalam kampanye

Budaya politik semu pro aktif dalam kampanye adalah masyarakat yang mendatangi kampanye yang dilakukan oleh calon pemimpin tetapi hanya mengambil uang dan atribut saja, setelah masa pencoblosan tiba mereka tidak mau

⁶⁹ Wawancara dengan Busra yang berada di gampong peudada pada tanggal 15 Februari 2019

⁷⁰ Wawancara dengan Junaidy yang berada di gampong Jawa pada tanggal 20 Februari 2019

memilih. Pernyataan ini didukung oleh hasil wawancara saya dengan ibu Maryam selaku pedagang sebagai berikut :

*“ Saya datang kampanye pada saat itu, ada uang transportasi katanya saya jadi tertarik untuk datang. Apa lagi di bagi baju kaos kan lumayan bisa di pakek nantinya ada juga yang memberikan makan siang, saya tidak ada pengaruh sedikitpun saya datang atau tidaknya waktu memilih paling saya datag ya tambah satu suara. Mending saya berkerja”.*⁷¹

Menariknya ketika masyarakat menganggap bahwa memilih bukan suatu hal yang berdampak langsung terhadap perubahan kedepan nya banyak yang menunggu momentum kampanye untuk menambah pundi-pundi pemasukan, tak jarang juga masyarakat mendatangi di dua kampanye berlawanan agar mendapatkan keuntungan material yang ganda hal ini juga di dukung oleh salah satu hasil wawancara dengan bapak Jalaludin sebagai buruh sebagai berikut :

*“ Saya ada datang di kampanye kemarin, ya pada saat itu kan yang naik pak amin dan ibu eli ya saya ada datang di dua-dua kampanye nya langsung. Ya di sana banyak di tebar janji ini lah janji itu lah ya paling banyak warga cuman cari uang saja 100 ribu juga per orang lumayan juga kan ada baju-baju kalender hadiah banyak lah “.*⁷²

b. Mengomentari proses pemilu

budaya politik semu mengomentari proses pemilu ialah masyarakat yang mereka hanya aktif berkomentar ketika masa kampanye sedang berlangsung tetapi setelah masa pencoblosan tiba mereka tidak mencoblos atau golput. Pernyataan ini didukung oleh hasil wawancara saya dengan bapak Abu Leman selaku toke kos sebagai berikut :

⁷¹ Wawancara dengan Maryam yang berada di gampong Jawa pada tanggal 23 Februari 2019

⁷² Wawancara dengan Jalaludin yang berada di gampong Keudah pada tanggal 23 Februari 2019

“ di kampung sini sendiri sangat kuat 2 kubu kemarin pertama kubu ibu eli kedua kubu bapak amin, terlepas itu semua pasti kawan-kawan sini ada juga suka dengan bapak amin ada juga suka dengan ibu eli sering juga ada konflik-konflik kecil seperti pemberitaan yang tidak mendasar yang merugikan salah satu calon itu biasa terjadi itu yang saya tau”.⁷³

Bapak di atas sangat memahami kondisi pilkada yang lalu tak jarang juga ia mengeluarkan fakta-fakta soal pilkada yang banyak orang tidak mengetahuinya tetapi ia tidak memilih hanya aktif mengomentari apa yang terjadi di masa pemilu hal ini juga di dukung oleh pernyataan lain nya oleh bapak julbahri yang berprofesi sebagai nelayan sebagai berikut :

“ Di gampong sini pas pilkada berlangsung banyak teman – teman yang mengagumi ibu eli dan juga mengagumi bapak amin seimbang lah , pernah ada cek cok tapi tak sampai baku hantam. Alhmdulillah pak amin menang kan sekarang kita harus mendukung semua program-program beliau jagan ada yang mengganggu yang sudah terjadi sudah lupakan ini harus kita jaga. Saya tau siapa saja yang ngak senag di gampong ini tapi saya di amkan”.⁷⁴

c. Mengomentari setelah Pilkada

budaya politik semu mengomentari setelah pilkada iadalah masyarakat yang aktif berkomentar tetapi tidak memilih ketika masa pemilihan berlangsung diadakan. Pernyataan ini di dukung dengan hasil wawancara dengan salah seorang nelayan yang berinisial Ahmad sanusi sebagai berikut :

“ Pak amin sendiri sekarang belum bangun apa-apa, kedepan kita ngak tau ada pembangunan atau tidak, sejauh ini saya rasakan makin susah ya beras miskin ngak sampe ke kalangan bawah lagi”.⁷⁵

⁷³ Wawancara dengan Abu Leman yang berada di gampong jawa pada tanggal 23 Februari 2019

⁷⁴ Wawancara dengan Zulbahri yang berada di gampong jawa pada tanggal 23 Februari 2019

⁷⁵ Wawancara dengan Ahmad Sanusi yang berada di gampong jawa pada tanggal 23 Februari 2019

Ia menilai bahwa setelah pilkada selesai tidak ada perubahan apapun yang dirasanya, bahkan ia menilai bahwa kepemimpinan terdahulu lebih sejahtera karena yang dahulu banyak program-program yang mendukung yang sifatnya kebutuhan seperti beras miskin dan lainnya, di samping itu pula tipe budaya politik semu berkomentar setelah pilkada ini juga saya dapati di dalam salah satu wawancara saya dengan salah seorang pedagang yang bernama kak ida nurhayati sebagai berikut :

*“ tidak ada perubahan yang saya rasakan setelah pilkada ini yang ada makin susah kami pedagang, enak walikota yang lalu masalah syariat islam ada, kalau sekarang ya kaya kurang syariat islam aja. Dalam kepemimpinan buk eli dulu raskin turun kesini sekarang mana ada janji dulu dikasih uang 5 juta janjinya kata pak amin sampe sekarang tidak di kasih apa-apa sebatas janji ”.*⁷⁶

Rasa kecewa terhadap hasil pilkada sebelumnya mengantar masyarakat engan untuk memilih kembali dalam pilkada kedepan, hal ini yang membuat budaya politik di kecamatan kuta raja dalam keadaan menjadi pemilih semu disetiap pilkada berlangsung karena mereka menganggap bahwa tidak ada perubahan yang berarti di setiap hasil pilkada terhadap hidup mereka rasa ketidakpuasan terhadap kinerja pemerintahan melahirkan suatu penghukuman ketidakpuasan (tidak percaya) yang memicu melahirkan suatu keputusan untuk tidak ikut dalam pemilu dan tidak terlibat dalam partisipasi politik lainnya.

Seperti pemaparan penulis di data 4.1 bahwasanya partisipasi semu di kecamatan kuta raja terbentuk oleh kekecewaan masyarakat terhadap banyak hal

⁷⁶ Wawancara dengan Ida Nurhayati yang berada di gampong Peudada pada tanggal 23 Februari 2019

seperti yang di jelaskan di atas sebelumnya diantaranya adalah penyebab pelayanan publik banyak nelayan contoh nya saja mengharapkan agar dimudahkannya akses untuk perizinan kapal ketika pendapat itu disalurkan ke para calon pemimpin tetapi tidak di tangapi dengan serius malah makin dibuat ribet hal tersebut membuat banyak nelayan yang sebelumnya memiliki motivasi untuk menentukan hak pilih kemudian menjadi masyarakat yang semu terhadap pemilihan umum.

Penyebab lainnya adalah banyak janji-janji masa kampanye yang dilupakan berupa bantuan-bantuan yang sifatnya struktural membuat sebagian masyarakat terutama ibu-ibu memakan janji berupa bedah rumah yang ternyata hanya cara untuk melembungkan suara membuat masyarakat menjadi semu yang membentuk suatu pola masyarakat yang hanya datang ke kampanye hanya untuk mengabil untung material saja ketika masa pencoblosan tiba mereka enggan untuk memilih kembali.

Faktor utama penyebab terbentuknya masyarakat semu amatan penulis adalah karena kekecewaan panjang yang tidak kunjung di wujudkan oleh penguasa yang menyebabkan hal tersebut membentuk pola masyarakat yang political distrust terhadap pemerintahan.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Bedasarkan pembahasan dan analisa data dalam penelitian tentang Partisipasi semu dan fenomena golput pada pemilihan walikota banda aceh 2017, maka bab ini akan di uraikan kesimpulan sebagai berikut :

Faktor kecewa yang berawal dari janji politik masa pilkada mengantar sebuah budaya baru ketika seluruh lapisan masyarakat mulai dari Nelayan, Pedagang, Ibu-ibu tidak merasa mendapatkan apa yang di janjikan, hal ini melahirkan budaya politik semu. Contohnya saja para Nelayan yang bermula memilih pada pilkada sebelumnya tidak mendapatkan apa yang telah dijanjikan lebih parahnya apa yang mereka harapkan berupa mudahnya perizinan lancar malah makin lama. Hal ini membuat perilaku mereka berubah. Yang hanya melihat pilkada sebagai ajang untuk mencari keuntungan sebanyak-banyaknya kepada para calon kandidat seperti menghadiri kampanye-kampanye akbar.

Tetapi mereka tidak hadir secara suara dalam proses pengambilan suara karna dasar kekecewaan diatas, adanya terbentuk tatanan masyarakat baru yang dimana ada nelayan yang dekat dengan pemerintahan dan juga tidak dekat dengan pemerintah menambah rasa enggan untuk meghadiri ke kotak suara. Nelayan yang dekat terhadap pemerintah pastinya ada kerjasama lanjutan ketika terpilih tidak dengan nelayan yang jauh terhadap pemerintah ketika pemerintah baru dilantik mereka dianaktirikan oleh mereka. Berimbas kepada perijinan Boat-Boat masuk dermaga Lampulo.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan diatas, maka yang dapat dikemukakan sebagai saran adalah saya mengharapkan adanya sosialisai yang dilakukan oleh KIP kota banda aceh atau pemerintahan kecamatan untuk melakukan sosialisasi untuk pencerdasan dan pemahaman politik yang desa-desanya memiliki angka golput yang tinggi beri pemahaman dan rebut hati rakyat kembali agar budaya politik semu dan golput semakin berkurang .



DAFTAR PUSTAKA

SUMBER BUKU

- Abdullah, Rozali. 2005. "Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung". Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Abdul Jalil, 'Membedah Akar Golput dalam Pemilu Serentak' Surabaya, 21 Desember 2015.
- Arifin, Anwar. 2003. *Komunikasi Politik, 'Paradigma-Teori-Aplikasi-Strategi Komunikasi Komunikasi Politik Indonesia'*. Balai Pustaka. Jakarta
- Alfian dan Nazaruddin Sjamsuddin : "Koleksi Buku 1991 Profil budaya politik Indonesia" : Jakarta Pustaka Utama Grafiti 1991 hal : 22-23
- Burhan Bugin. 2001. Penelitian Kualitatif : *'Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial'*. Jakarta : Kencana Prenama Media Group. Hal 111.
- Budiardjo, Miriam. 2008. *'Dasar-Dasar Ilmu Politik Jakarta'* : PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Bagong Suyanto. 2005. *'Metode Penelitian Sosial : Berbagai alternatif pendekatan'*. Jakarta : Perdana Media.
- David F. Roth dan Frank L. Wilson, *'The Comparative study of politics'*, edisi ke 2, Boston: Houghton Mifflin Company, 1976.
- David Moon The Determinants of Turnout in President Election An Integrative Model Accounting for Information dalam Political Behaviour Vol 14 No 2 1992
- Emzir. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Gabriel A. Almon and Bingham Powell, *Comparative Politics A Developmental Approach* dikutip Rusadi Kantrapawira, Budaya Politik.
- Iqbal, Muhammad. 2018. *Perbandingan Fenomena Golongan Putih pada Pemilihan dan wakil gubernur Aceh*.
- Kacung. 2006 *Marijan Demokrasi di daerah : Pelajaran dari pilkada secara langsung*. Pustaka Eureka
- KH. Abdurrahman Wahid, Halim HD, dkk. *Mengapa Kami Memilih Golput* (Jakarta: Sagon, 2009).

Rinjani,Rahman. 2014.*Studi Tentang Golongan Putih Dalam Pilkada Gubernur Kaltim 2013 di Kecamatan Muara*. INKLUSI.

Michael rush dan althoff, pengantar sosiologi politik, PT Rajawali,Jakarta, 1989.

Miriam Budiarjo, ‘*Demokrasi Di Indonesia Antara Demokrasi Parlemen Dan Demokrasi Pancasila*’(Jakarta: Gramedi Pustaka Utama, 1994).

Nimmo, Dan. 2006. Komunikasi Politik : Khalayak dan Efek. Rosdakarya. Bandung

Sugiono. 2008. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung alfabeta. Hal 2018.

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Penerbit Balai Pustaka, 2007).

Winarno, Budi. 2002. Kebijakan Publik: Teori dan Proses. Media Presindo: Yogyakarta.

SKRIPSI DAN JURNAL

David Apter, Pengantar Analisa Politik, (Jakarta: LP3ES, 1976)

Diamond, Larry. 2003. Developing Democracy Toward Consolidation.

Diamond, Larry. 2003. Developing Democracy Toward Consolidation.Yogyakarta: IRE Press.

Efriza, political Explore, 2012 di akses pada tanggal 11 November 2018 dari situs :<https://www.digilib.unila.ac.id/10917/4/Bab%20II%20%28Skripsi%20Hendra%29.pdf>.

Marwiyah.Siti (2016). Golput dalam pemilukada serentak.jakarta : Jurnal etika & pemilu.

Muhammad Asfar. 2006, Pemilu dan Perilaku Memilih, diakses pada tanggal 07 agustus 2018

Nurfitri. 2019. *Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pilkada Kota Banda Aceh 2017 (Analisis Terhadap Menurunnya Angka Golongan Putih)*. Skripsi. Fisip Uin Ar-raniry.

Nuzul Apriliani. 2013. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Golput Pada Pemilukada Tahun 2012 Di Kota Banda Aceh*. Skripsi. Fisip Unsyiah

Yoza Habibie. 2014. *Fenomena Timbulnya Golongan Putih (Golput) pada Pemilukada Walikota/Wakil Walikota 2012 DI Kota Langsa*. Skripsi. FISIP Unsyiah.

INTERNET

<https://kip.acehprov.go.id/>

kpukotaBandaAceh.com

<http://kabar24.bisnis.com/read/20151212/15/501167/Pemilukada-serentak-tingginya-golput-bukti-masyarakat-alami-kejenuhan> di akses pada tanggal 13 agustus 2019

Surbakti,Ramlan, 1992, Memahami Ilmu Politik, diakses pada tanggal 18 september dari situs <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jurnaleksektif/article/viewFile/16189/15693>

Surbakti,Ramlan, 1992, Memahami Ilmu Politik, diakses pada tanggal 11 maret dari situs <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jurnaleksektif/article/viewFile/16189/15693>

<https://eprints.uny.ac.id/23755/4/4.BAB%20II.pdf> Jurnal yang diakses pada tanggal 19 maret 2019

BPS Banda Aceh dalam Angka Tahun 2019.com



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIP UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

NOMOR: 219/Un.08/FISIP/Kp.07.6/02/2019

TENTANG

PENGANGKATAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

DEKAN ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN UIN AR-RANIRY

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran bimbingan skripsi dan ujian munaqasyah mahasiswa pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh maka dinilai perlu menunjuk pembimbing skripsi tersebut yang dituang dalam Surat Keputusan Dekan.
- b. bahwa nama yang tersebut dalam Surat Keputusan ini dinilai cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai pembimbing skripsi.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang perubahan atas peraturan pemerintah RI Nomor 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelola Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
8. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Keputusan Menteri Agama Nomor 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian wewenang pengangkatan, Penindahan dan Pemberhentian PNS di Lingkungan Departemen Agama Republik Indonesia;
10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 293/KMK05/2011 tentang penetapan Institut Agama Islam Negeri Banda Aceh pada Kementerian Agama sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Badan Layanan Umum;
11. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh Nomor : 02/Un.08/R/Kp.07.5/01/2018 Tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Pejabat di Lingkungan UIN Ar-raniry Banda Aceh;
- Memperhatikan : Keputusan Sidang/seminar Proposal Skripsi Prodi Ilmu Politik pada tanggal 22 Januari 2019

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Menunjuk Saudara
1. Ade Irma, B.Hsc, MA sebagai pembimbing pertama
2. Rizki Lhena Darwin, MA sebagai pembimbing kedua
- Untuk membimbing skripsi
- Nama : Arief Rachman Missuari
- NIM : 150801061
- Prodi : Ilmu Politik
- Judul : Fenomena Golput di Kecamatan Kuta Raja pada Pemilihan WALIKOTA Banda Aceh 2017
- KEDUA : Pembiayaan honorarium pembimbing pertama dan kedua tersebut diatas di bebaskan pada DIPA UIN Ar-Raniry Banda Aceh tahun 2019.
- KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya semester ganjil 2019/2020 dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 28 Januari 2019

An. Rektor
Dekan


Emila Dewi

Tembusan

1. Rektor UIN Ar-raniry Banda Aceh
2. Ketua Prodi ILMU POLITIK FISIP UIN Ar-Raniry;
3. Pembimbing yang bersangkutan untuk dimaklumi dan dilaksanakan
4. Yang bersangkutan

PROFIL INFORMAN

Nama	Jabatan/Posisi	Umur
Khumaidi	Masyarakat Gampong Jawa	±40 Tahun
Safrizal	Nelayan	36 Tahun
Mustafa	Nelayan	±40 Tahun
Agus	Nelayan	35 Tahun
Maryani	Pedagang	42 Tahun
Maryamah	Pedagang	±40 Tahun
Mursalin	PNS	±40 Tahun
Fauzan	Penganguran	30 Tahun
Busra	Pedagang	±40 Tahun
Junaidy	Nelayan	±30 Tahun

LAMPIRAN FOTO



Foto bersama narasumber ibu ida nurhayati dan ibu maryam warga Gampong Jawa 14 februari 2019.



Foto bersama narasumber ibu maryani sebagai pedagang di gampong jawa tanggal 14 februari 2019.



Foto bersama narasumber ibu maryamah sebagai pedagang di Gampong Peudada pada tanggal 20 februari 2019.



Foto bersama narasumber bapak junaidy selaku nelayan di Gampong jawa

Pada tanggal 20 februari 2019.



Wawancara dengan Abu leman yang berada di gampong jawa pada tanggal 23 februari 2019.



Wawancara dengan Zulbahri yang berada di gampong jawa pada tanggal 23 februari 2019